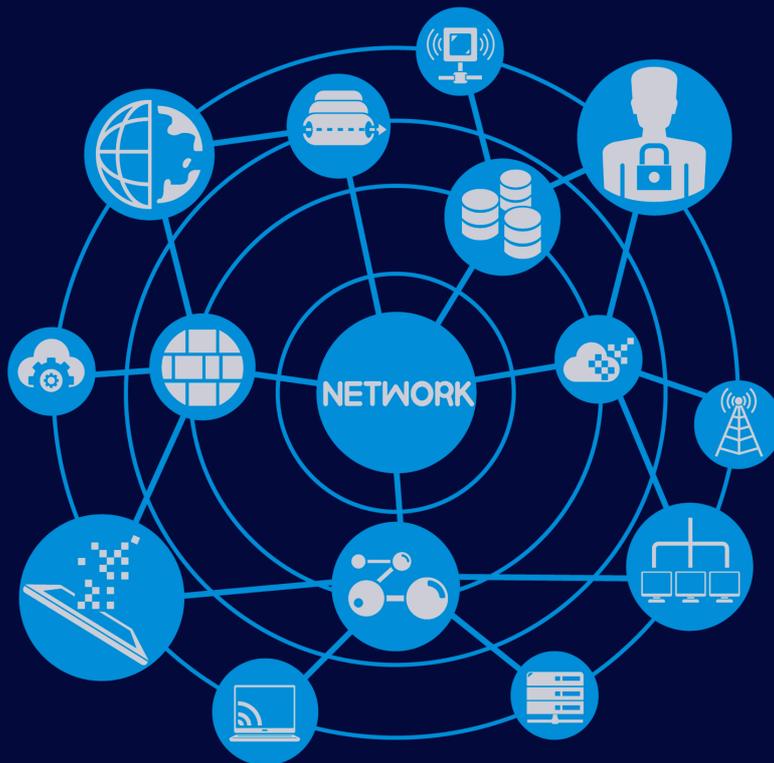




MANAJEMEN DATA SPBE



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIREBON

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas karunia dan rahmat-Nya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon telah menyelesaikan Buku Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon. SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan terpercaya serta meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.

Salah satu manajemen SPBE yang dilakukan oleh setiap Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam mengelola SPBE adalah dengan melalui Manajemen Data yang meliputi Manajemen Arsitektur Data, Manajemen Data Induk dan Data Referensi, Manajemen Basis Data, serta Manajemen Kualitas Data. Manajemen Data SPBE disusun dengan maksud sebagai pedoman untuk mengatur tata kelola data yang tersistem dan terintegrasi di Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai bentuk implementasi penyelenggaraan Tata Kelola SPBE di Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon sehingga dapat tercapai data yang akurat, mutakhir, terintegrasi serta mudah diakses dan dibagipakaikan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan. Hal ini juga sebagai bentuk implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2016 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 56 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Cirebon.

Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan untuk kelancaran penyusunan Buku Manajemen Data SPBE ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Cirebon, 4 April 2022

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon,



NANAN ABDUL MANAN, S.STP.,M.St.

Pembina Tk. I

NIP. 19800703 199810 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Sasaran.....	3
1.4. Ruang Lingkup Manajemen Data.....	3
BAB II MANAJEMEN ARSITEKTUR DATA	4
BAB III MANAJEMEN DATA INDUK DAN DATA REFERENSI	15
BAB IV MANAJEMEN BASIS DATA	40
BAB V MANAJEMEN KUALITAS DATA	44

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	Format Isian Daftar Data Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon 7
Tabel 2	Struktur Baku Metadata Kegiatan Statistik 9
Tabel 3	Struktur Baku Metadata Variabel 10
Tabel 4	Struktur Baku Metadata Indikator 11
Tabel 5	Pengelompokan Data per Sektor 13
Tabel 6	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024..... 17
Tabel 7	Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (Dampak/Impact) Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024 18
Tabel 8	Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Program (Outcome) Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.. 19
Tabel 9	Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs 33

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Alur Tata Kelola Data Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon (Sesuai Perbup No. 56 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Cirebon)	5
Gambar 2 Flow Chart Manajemen Basis Data Statistik Sektorial dalam Open Data Kabupaten Cirebon	41
Gambar 3 Jaringan Informasi Geospasial Nasional	43
Gambar 4 Alur Kerja Simpul Jaringan	43

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi pemerintah memberikan peluang untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-government*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, Aparatur Sipil Negara (ASN), pelaku bisnis, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya. Penerapan SPBE akan mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Momentum pengembangan SPBE telah dimulai sejak diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government dimana menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah diinstruksikan untuk melaksanakan pengembangan SPBE sesuai tugas, fungsi, kewenangan, dan kapasitas sumberdaya yang dimiliki. Sejalan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon telah melaksanakan penerapan SPBE dalam penyelenggaraan pemerintah. Namun demikian, penerapan SPBE lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon masih menemui kendala, salah satunya dalam penerapan manajemen data.

Data merupakan substansi penting dalam proses pembangunan, termasuk dalam proses penyelenggaraan SPBE. Data menjadi dasar dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah yang menentukan apakah suatu kebijakan tepat atau justru sebaliknya. Permasalahannya, meskipun data tersedia di semua instansi, namun kenyataannya data sulit dicari. Kalaupun datanya tersedia, belum tentu data tersebut akurat dan *up to date*. Hal ini yang menyebabkan sulitnya menentukan kebijakan yang tepat.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mengamanahkan bahwa untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional perlu dilakukan manajemen data. Hal ini sejalan dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bahwa tujuan Satu Data Indonesia adalah untuk mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Berdasarkan kedua Perpres tersebut, tata kelola atau manajemen data adalah hal mendasar yang menjadi pijakan awal dalam proses penyusunan kebijakan pemerintah. Manajemen data itu sendiri merupakan proses pengelolaan data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.

Tata kelola data di Kabupaten Cirebon mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Satu Data Kabupaten Cirebon. Dalam Peraturan Bupati tersebut mengatur mekanisme perencanaan, pengumpulan dan penyebarluasan data. Untuk mengatur manajemen data SPBE lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon agar dihasilkan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi dan dapat diakses, diperlukan manajemen data SPBE yang harus dilaksanakan seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk mencapai tujuan SPBE.

1.2. Maksud dan Tujuan

Manajemen Data dimaksudkan untuk mengatur tata kelola data yang tersistem dan terintegrasi di Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai bentuk implementasi penyelenggaraan Tata Kelola SPBE Tingkat Kabupaten Cirebon. Adapun tujuan dari Manajemen Data tersebut adalah menyediakan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

1.3. Sasaran

Manajemen Data dilaksanakan dengan sasaran sebagai berikut:

- 1) Tersedianya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
- 2) Terwujudnya penerapan SPBE di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- 3) Meningkatnya kinerja pemerintahan di Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

1.4. Ruang Lingkup Manajemen Data

Manajemen Data merupakan serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data, dan interoperabilitas data. Perencanaan Manajemen Data tertuang pada Peta Rencana SPBE lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon. Ruang lingkup manajemen data adalah sebagai berikut:

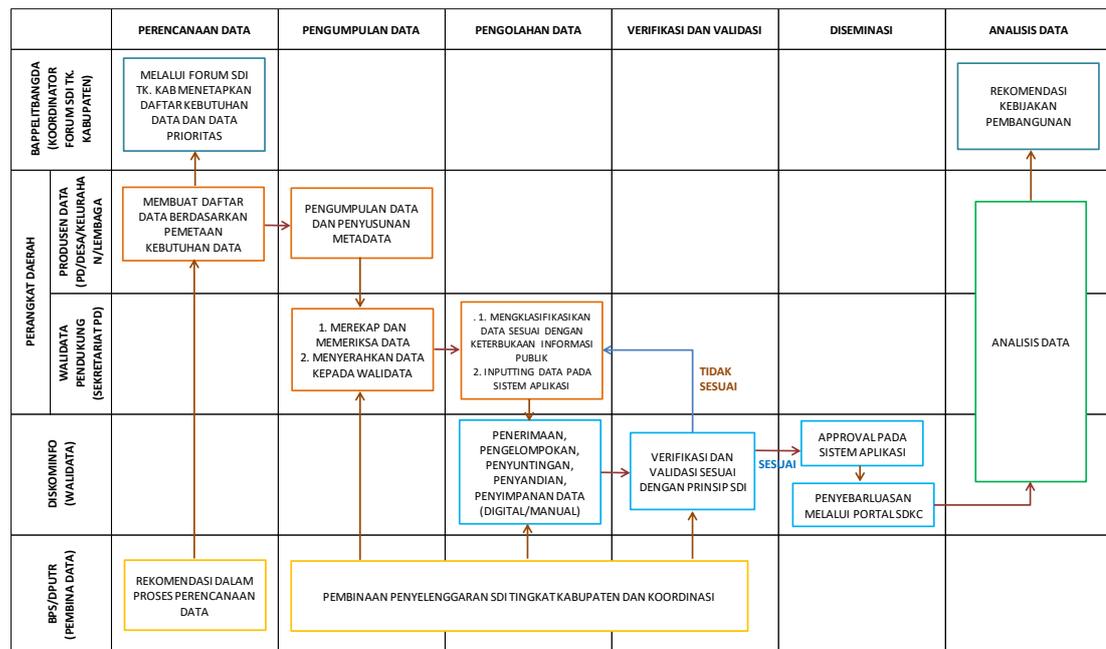
- 1) Arsitektur Data
- 2) Data Induk dan Data Referensi
- 3) Basis Data
- 4) Kualitas Data

II. MANAJEMEN ARSITEKTUR DATA

Menurut Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data SPBE, Arsitektur Data adalah model yang mengatur dan menentukan jenis data yang dikumpulkan, disimpan, dikelola, dan diintegrasikan dalam SPBE. Manajemen Arsitektur Data adalah rangkaian proses untuk menetapkan dan menyebarluaskan komponen Arsitektur Data. Komponen utama dalam manajemen arsitektur data yaitu meliputi Spesifikasi Data dan Ketentuan Data. Spesifikasi Data terdiri atas format dan struktur baku untuk Data Induk dan Data Referensi, sedangkan Ketentuan Data mencakup tata cara perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan spesifikasi data.

Tujuan Manajemen Arsitektur Data adalah untuk: (1) Menyediakan data yang berkualitas tinggi; (2) Mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan data; serta (3) Merancang struktur dan rencana untuk memenuhi kebutuhan data saat ini dan kebutuhan data jangka panjang. Manajemen Arsitektur Data SPBE Tingkat Daerah juga sebagai perwujudan dari penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah. Dalam Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Cirebon mengatur mekanisme perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi dan analisis data.

Alur tata kelola data di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Tata Kelola Data Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon (Sesuai Perbup No. 56 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Cirebon)

Dalam tata kelola data di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon terdiri dari 6 tahapan, yaitu perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi dan analisis data. Masing-masing tahapan tersebut tidak lepas dari peran setiap penyelenggara Satu Data Kabupaten Cirebon.

a. Perencanaan Data

Perencanaan data dilakukan untuk memenuhi kebutuhan data dan menghindari duplikasi data serta sebagai acuan dalam pelaksanaan pengumpulan data. Dalam proses perencanaan data, setiap Produsen Data (Perangkat Daerah/Desa/Kelurahan/Lembaga Lainnya) membuat daftar data sebagai kebutuhan data daerah. Daftar data dibuat berdasarkan pemetaan kebutuhan data pemerintah daerah, arahan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dan disepakati dalam Forum Satu Data Kabupaten Cirebon. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon (Bappelitbangda) sebagai Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten

menetapkan Daftar Kebutuhan Data dan Data Prioritas melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

Kriteria data yang dikategorikan ke dalam Data Prioritas adalah sebagai berikut:

- 1) Mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Bupati/Gubernur yang tertuang dalam RPJMD;
- 2) Mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;
- 3) Memenuhi kebutuhan program, kegiatan dan kebijakan yang mendesak.

Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cirebon ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 048/Kep.266-diskominfo/2022. Susunan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cirebon terdiri dari: (1) Dewan Pengarah, (2) Pembina Data, (3) Walidata, (4) Walidata Pendukung Teknis, (5) Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data, dan (6) Produsen Data. Tugas Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Cirebon;
- 2) Merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis Sistem Pengelolaan Satu Data Kabupaten Cirebon;
- 3) Mengidentifikasi dan mengelola daftar data untuk sistem pengelolaan data terpadu, serta menetapkan kewenangan dan tanggung jawab untuk menerbitkan data agar dapat digunakan secara maksimal dan manfaatnya dapat disebarluaskan;
- 4) Menyusun rencana aksi tahunan Sistem Pengelolaan Satu Data Kabupaten Cirebon;
- 5) Menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Cirebon;
- 6) Membahas dan menentukan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya serta Daftar Data Prioritas;
- 7) Menyiapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaan Sistem Pengelolaan Satu Data Kabupaten Cirebon secara berkala kepada Bupati.

Daftar data yang dibuat oleh Perangkat Daerah memuat produsen data untuk masing-masing data, satuan, cara pengumpulan data, pengkategorian prioritas atau non prioritas, untuk kebutuhan apa data

tersebut dan apakah data boleh dipublikasi kepada umum atau hanya internal Pemerintah Daerah. Selanjutnya daftar data tersebut diserahkan kepada Walidata (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon) dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati. Adapun format daftar data pada setiap Perangkat Daerah adalah seperti tercantum dalam **Tabel 1**.

Tabel 1. Format Isian Daftar Data Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

No	Elemen Data	Frekuensi	Level Estimasi	Prioritas/ Non Prioritas	Cara Pengumpulan Data	Kebutuhan	Publikasi (Internal Pembkab/Umum)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Dalam kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, data yang dikumpulkan oleh setiap Perangkat Daerah menjadi dasar penetapan kebijakan perencanaan anggaran. Hal ini dimaksudkan agar pengumpulan data oleh Perangkat Daerah berjalan tepat waktu dan diperbaharui secara terus menerus. Daftar Data Prioritas setiap Perangkat Daerah harus dimasukkan ke dalam capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Cirebon tentang Satu Data Kabupaten Cirebon.

b. Pengumpulan Data

Setelah Daftar Data dibuat oleh masing-masing Perangkat Daerah, selanjutnya Perangkat Daerah melakukan pengumpulan data dan penyusunan metadatanya. Walidata Pendukung yang berkedudukan di setiap Perangkat Daerah merekap dan memeriksa data, mengklasifikasikan data sesuai dengan keterbukaan informasi publik, selanjutnya menyerahkan data kepada Walidata, baik melalui *inputting* data ke dalam sistem aplikasi maupun secara manual.

Dari setiap Daftar Data yang telah ditetapkan, harus disusun metadatanya. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.

Metadata sering disebut sebagai data tentang data atau informasi tentang informasi. Metadata mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen file/data tersebut dalam suatu basis data. Setiap data yang dikumpulkan wajib ada metadatanya. Manfaat metadata adalah sebagai berikut:

- ✓ **Pembina Data:** menjadi alat bagi pengukuran tingkat kematangan penyelenggaraan statistik. Dengan adanya ukuran tersebut, pembina data dapat menentukan program pembinaan statistik yang tepat sasaran sesuai dengan tingkat kebutuhan;
- ✓ **Produsen Data:** menghindari duplikasi kegiatan, meningkatkan efisiensi anggaran, peningkatan nilai organisasi karena tatakelola informasi yang baik, memudahkan seluruh unsur pimpinan dalam memahami indikator kinerjanya, dan menjaga kesinambungan data pada saat pergantian pengelola kegiatan/data;
- ✓ **Walidata:** memudahkan dalam memahami dan mengelola data dan informasi sebagai investasi organisasi, dokumentasi tahapan pengolahan data, pengendalian mutu, definisi, penggunaan data, keterbatasan, dan sebagainya, serta mencegah kesalahan dalam penyampaian data;
- ✓ **Pengguna Data:** dapat memudahkan dalam memahami data, mencegah kesalahan penggunaan dan interpretasi data, serta menjamin ketepatan dalam pemanfaatan data.

Metadata terdiri dari 3 jenis dengan masing-masing format yang berbeda, yaitu (1) Metadata Kegiatan Statistik; (2) Metadata Variabel; dan (3) Metadata Indikator. Formulir metadata mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik seperti tercantum dalam **Lampiran 1**. Penjelasan masing-masing jenis metadata tersebut adalah sebagai berikut:

- **Metadata Kegiatan**

Kegiatan statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangnya Sistem Statistik Nasional. Kegiatan statistik ini bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir guna mendukung pembangunan nasional. Data statistik dapat diinterpretasikan dengan benar dan tepat jika karakteristik

atau atribut dari data tersebut didefinisikan dalam bentuk metadata statistik. Metadata kegiatan adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyelenggaraan kegiatan statistik.

Tabel 2. Struktur Baku Metadata Kegiatan Statistik

No	Struktur Metadata Kegiatan
1	Nama kegiatan statistik
2	Identifikasi penyelenggara
3	Tujuan pelaksanaan
4	Periode pelaksanaan
5	Cakupan Wilayah
6	Rancangan pengumpulan data/metodologi
7	Rancangan pengolahan data
8	Level estimasi
9	Analisis

- Metadata Variabel

Variabel didefinisikan sebagai konsep yang dapat diukur dan memiliki variasi hasil pengukuran. Variabel statistik merupakan variabel yang digunakan pada kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga. Setiap variabel memiliki konsep dan definisi yang perlu dipahami terlebih dahulu sebelum menggunakan variable tersebut. Data yang dikumpulkan dari variabel-variabel kegiatan statistik akan menghasilkan angka-angka statistik maupun indikator. Variabel didefinisikan sebagai konsep yang dapat diukur dan memiliki variasi hasil pengukuran. Variabel statistik merupakan variabel yang digunakan pada kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga.

Tabel 3. Struktur Baku Metadata Variabel

No	Struktur Metadata Variabel
1	Kode Kegiatan
2	Nama Variabel
3	Alias
4	Konsep
5	Definisi
6	Referensi Pemilihan
7	Referensi Waktu
8	Tipe Data
9	Domain Value
10	Kalimat Pertanyaan
11	Apakah Variabel dapat Diakses Umum

- Metadata Indikator

Metadata indikator adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dasar terbentuknya suatu indikator, interpretasi terhadap suatu indikator, variabel pembentuk indikator, rumus yang digunakan dalam metode penghitungan indikator, dan informasi lain yang perlu untuk diketahui dalam upaya memberikan pemahaman yang tepat dalam menggunakan nilai indikator yang dihasilkan.

Tabel 4. Struktur Baku Metadata Indikator

No	Struktur Metadata Indikator
1	Nama Indikator
2	Konsep
3	Definisi
4	Interpretasi
5	Metode/Rumus Penghitungan
6	Ukuran
7	Satuan
8	Klasifikasi
9	Publikasi ketersediaan indikator pembangun
10	Nama Indikator Pembangun
11	Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun
12	Nama Variabel Pembangun
13	Level Estimasi
14	Apakah Indikator Dapat Diakses Umum

Penyusunan metadata dilakukan oleh Produsen Data, dengan pendampingan dari Dinas Komunikasi dan Informatika serta Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. Pendampingan penyusunan metadata dilakukan secara bertahap, diawali dengan sosialisasi tentang metadata, desk penyusunan metadata pertama dan kedua, serta desk ketiga jika diperlukan. Selain itu juga dilakukan rapat koordinasi dalam penyusunan metadata statistik sektoral.

Dalam proses pengumpulan data statistik sektoral, terdapat 4 cara yaitu: (1) Sensus; (2) Survei; (3) Kompilasi produk administrasi; dan (4) Cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi. Untuk pengumpulan data dengan metode survei, baik dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga lain wajib melaporkan kegiatan statistik tersebut kepada BPS. Selanjutnya BPS akan memberikan rekomendasi yang menyatakan kegiatan tersebut layak atau tidak untuk dilanjutkan. Tata cara pemberian rekomendasi pada kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh pemerintah mengacu pada Panduan Rekomendasi Kegiatan Statistik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik dengan nomor katalog 1303019.

Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, penyelenggara survei statistik sektoral wajib memberitahukan rencana penyelenggaraan surveinya kepada BPS, mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS, dan menyerahkan hasil penyelenggaraan survei yang dilakukannya kepada BPS. Pemberitahuan rancangan penyelenggaraan survei statistik sektoral kepada BPS dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan statistik tidak terjadi duplikasi penyelenggaraan survei dan hasil kegiatan statistik sektoral tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal serta dalam rangka menyusun metadata statistik sektoral yang dapat diakses oleh semua pihak.

Penyampaian pemberitahuan penyelenggaraan survei statistik sektoral dilakukan dengan menggunakan kuesioner FS3 yang dapat diperoleh dari kantor BPS terdekat ataupun dengan mengakses website Sistem Informasi Rujukan Statistik BPS dengan alamat <http://sirusa.bps.go.id>. Kuesioner FS3 terdapat dalam **Lampiran 2**.

- **Pengolahan Data**

Walidata melakukan pengolahan data baik melalui sistem ataupun manual dengan tahapan: (1) Penerimaan; (2) Pengelompokan; (3) Penyuntingan, (4) Penyandian; dan (5) Perekaman/penyimpanan data. Selanjutnya data diverifikasi dan validasi oleh Walidata sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia, yaitu Standar Data, Metadata, Kode Referensi dan Interoperabilitas. Apabila data tidak sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia, maka dikembalikan kepada Perangkat Daerah yang mengumpulkan data tersebut untuk diperbaiki sesuai hasil pemeriksaan. Apabila data tersebut sudah sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia, maka Walidata melakukan *approval* pada Sistem Aplikasi dan penyebarluasan melalui Portal Open Data Kabupaten Cirebon dalam website cirebonkab.go.id.

Data Prioritas yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data juga diperiksa oleh Walidata, dan diperiksa kembali oleh Pembina Data. Hasil pemeriksaan Pembina Data, disampaikan oleh Walidata kepada Pembina Data. Apabila tidak sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, maka dikembalikan kepada Produsen Data untuk diperbaiki.

Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data dikelompokkan per sektor, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5. Pengelompokan Data per Sektor

No	Sektor	Perangkat Daerah
1	Sosial Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Sosial 4. BPBD 5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Ddn Desa 9. Dinas Pemuda dan Olah Raga 10. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 11. Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan
2	Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2. Dinas Pertanian 3. Dinas Perdagangan dan Perindustrian 4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Fisik/Infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 3. Dinas Lingkungan Hidup 4. Dinas Perhubungan
4	Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat Daerah 2. Sekretariat Dewan 3. Inspektorat 4. Dinas Komunikasi dan Informatika 5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 6. Badan Keuangan dan Aset Daerah 7. Badan Pendapatan Daerah 8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 10. Satuan Polisi Pamong Praja

- **Analisis Data**

Walidata dan Produsen Data melakukan analisis data untuk bahan rekomendasi kebijakan pembangunan. Analisis data ini dilakukan secara mandiri maupun dengan melibatkan pakar/ahli. Selanjutnya hasil analisis data dapat dimanfaatkan oleh Bapelitbangda dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah. Analisis data juga dilakukan dalam bentuk infografis agar lebih memudahkan pengguna data dalam memahami informasi dan hasil analisis yang disajikan.

- **Penyebarluasan Data**

Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data. Penyebarluasan data dilakukan oleh Walidata melalui portal Open Data Kabupaten Cirebon dalam website cirebonkab.go.id. Selain melalui sistem aplikasi, penyebarluasan data juga dilakukan melalui media cetak dan media elektronik lainnya dengan memperhatikan kerahasiaan, privasi, keamanan dan Hak Kekayaan Intelektual. Data yang disebarluaskan adalah data yang statusnya informasi terbuka.

III. MANAJEMEN DATA INDUK DAN DATA REFERENSI

Manajemen Data Induk dan Data Referensi dilaksanakan untuk menyediakan data yang: (a) sesuai struktur dan format baku yang ditentukan; (b) dapat dijadikan acuan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagipakaikan; serta (c) menghindari duplikasi. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia. Sementara itu, data referensi adalah komponen yang mendeskripsikan substansi data yang berupa spesifikasi dan kategorisasi, dan ketentuan mengenai data, serta mengintegrasikannya dengan domain arsitektur SPBE yang lain. Dalam data referensi terdapat Kode Referensi, yaitu tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perencanaan Data Induk dan Data Referensi dilaksanakan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat berdasarkan: (a) Daftar Data; (b) Usulan Pembina Data; dan (c) Arahan Dewan Pengarah Satu Data Indonesia. Pengumpulan Data Induk dan Data Referensi dilakukan oleh Walidata dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat. Pemeriksaan Data Induk dan Data Referensi dilakukan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat untuk memastikan: (a) Kesesuaian dengan struktur dan format baku; (b) Kesesuaian dengan Daftar Data tahun berikutnya; dan (c) Tidak terjadi duplikasi.

Data Induk dan Data Referensi disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat. Data Induk dan Data Referensi yang telah disepakati disampaikan oleh Koordinator Forum Satu Data Indonesia kepada Dewan Pengarah Satu Data Indonesia. Selanjutnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menetapkan Data Induk dan Data Referensi yang telah disepakati. Penyebarluasan Data Induk dan Data Referensi dilakukan oleh Walidata melalui Portal Satu Data Indonesia. Pembaruan Data Induk dan Data Referensi diperbarui sesuai kebutuhan. Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat

mengoordinasikan pembaruan Data Induk dan Data Referensi dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.

Kegiatan Manajemen Data Induk dan Data Referensi dilaksanakan selaras dengan perumusan dan penyepakatan Kode Referensi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia. Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat merumuskan kebijakan teknis dalam rangka penyelarasan manajemen Data Induk dan Data Referensi dengan Kode Referensi.

Di tingkat daerah, Walidata Tingkat Daerah telah menyusun Data Induk dan Data Referensi sesuai dengan tugas dan kewenangan setiap Perangkat Daerah. Dari identifikasi dan inventaris data yang telah dilakukan, selanjutnya dibuat Daftar Data seperti tercantum dalam **Lampiran 3**. Bersama dengan Bappelitbangda Kabupaten Cirebon sebagai Koordinator Forum Satu Data Tingkat Daerah dan BPS Kabupaten Cirebon sebagai Pembina Data Tingkat Daerah, telah disepakati Data Prioritas Pembangunan Daerah. Penentuan Data Prioritas didasarkan pada: (a) Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); (b) Standar Pelayanan Minimal (SPM); (c) Indikator Kinerja dalam RPJMD; (d) Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; dan (e) Rencana Strategis setiap Perangkat Daerah.

Data Prioritas ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

Tabel 6. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan
1.	Persentase penambahan budaya daerah yang dilestarikan	Persen
2.	Jumlah kelompok/komunitas kebudayaan yang aktif	Kelompok
3.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin
4.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun
5.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun
6.	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun
7.	Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan	Persen
8.	Tingkat pengangguran terbuka	Prosen
9.	PDRB Per Kapita	Juta Rp
10.	Persentase Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani di Kabupaten Cirebon	Persen
11.	Rasio Kesempatan Kerja	Persen
12.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin
13.	Prosentase Penyelesaian Friksi/Gesekan antar Umat Beragama	Persen
14.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Prosen
15.	Indeks Gini	Poin
16.	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan	Ribu Rupiah/Kapita /Tahun
17.	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Prosen
18.	Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan	Prosen
19.	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Prosen
20.	Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Prosen
21.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Poin
22.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Poin
23.	Indeks pembangunan infrastruktur wilayah yang mantap (baik)	Poin
24.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Poin
25.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks
26.	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Poin
27.	Indeks kemandirian fiskal daerah	Prosen
28.	Nilai SAKIP	Poin
29.	Opini BPK terhadap LKPD	WTP
30.	Indeks <i>Monitoring Center for Prevention (MCP)</i>	Poin
31.	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Poin
32.	Jumlah desa mandiri	Desa
33.	Indeks Ketertiban dan Ketenteraman	Persen
34.	Jumlah pelanggaran Perda	Kasus
35.	Indek resiko bencana	Poin

Tabel 7. Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (Dampak/Impact) Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Rumus	Satuan
1	2	3	4
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
	FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI		
1	Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan	$(\text{PDRB pada tahun berkenaan} - \text{PDRB tahun sebelumnya}) / \text{PDRB tahun sebelumnya} \times 100\%$	Persen
2	Laju inflasi	Perubahan nilai inflasi dari nilai tahun sebelumnya	Persen
3	PDRB per kapita		
	a. PDRB per kapita ADHB	$\text{PDRB ADHB} / \text{jumlah Penduduk}$	Juta Rupiah
	b. PDRB per kapita ADHK	$\text{PDRB ADHK} / \text{jumlah Penduduk}$	Juta Rupiah
4	Indeks Gini	Tingkat kesenjangan pendapatan yang dihitung melalui variabel total pendapatan dan total pengeluaran per penduduk	Poin
5	Prosentase penduduk miskin	$\text{Jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan} / \text{total jumlah penduduk} \times 100\%$	Persen
6	Indeks keparahan kemiskinan	Ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin	Persen
7	Indeks kedalaman kemiskinan	Rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan	Persen
	FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL		
8	IPM	$(\text{Indeks Kesehatan} \times \text{Indeks Pendidikan} \times \text{Indeks Pengeluaran})^{1/3} \times 100$	Poin
9	Angka Melek Huruf	$\text{Jumlah penduduk usia di atas 15 tahun yang bisa baca tulis} / \text{jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas} \times 100\%$	Persen
10	Angka rata-rata Lama Sekolah	Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal yang dihitung melalui variabel partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang pernah diduduki, kelas yang sedang dijalani, dan jenjang pendidikan yang ditamatkan	Tahun
11	Umur Harapan Hidup (UHH)	Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh sejak lahir yang dihitung melalui variabel anak lahir hidup dan anak masih hidup	Tahun
12	Persentase Balita Gizi Buruk	$\text{Jumlah balita gizi buruk} / \text{jumlah balita} \times 100\%$	%
13	Prevalensi balita gizi kurang	$\text{Jumlah balita gizi kurang} / \text{jumlah balita} \times 100\%$	%
14	Cakupan desa siaga aktif	$\text{Jumlah desa siaga aktif} / \text{jumlah desa siaga yang dibentuk} \times 100\%$	%

Tabel 8. Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Program (Outcome) Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024

Kode	ASPEK/ URUSAN/ PROGRAM	Indikator Kinerja Program (outcome)	SKPD
1	2	3	11
	ASPEK PELAYANAN UMUM		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
1.01.02.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka partisipasi kasar	DINAS PENDIDIKAN
		Angka partisipasi kasar SD	DINAS PENDIDIKAN
		Peningkatan Persentase Masyarakat Melek Aksara	DINAS PENDIDIKAN
		Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV jenjang SD	DINAS PENDIDIKAN
		Angka Melek Huruf Al Qur'an jenjang SD	DINAS PENDIDIKAN
		Angka Melek Huruf Al Qur'an SMP	DINAS PENDIDIKAN
		Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Kondisi Ruang Kelas Baik PAUD/TK	DINAS PENDIDIKAN
		Peningkatan Capaian Angka Lulusan Kesetaraan Paket A setara SD	DINAS PENDIDIKAN
		Angka partisipasi kasar SMP	DINAS PENDIDIKAN
		Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Persentasi fasilitas yang dimiliki sekolah PAUD/TK	DINAS PENDIDIKAN
		Peningkatan Capaian Angka Kelulusan Warga Belajar Paket B setara SMP	DINAS PENDIDIKAN
		Standar Pelayanan Minimal	DINAS PENDIDIKAN
		Peningkatan Angka Lulusan pada jenjang Kesetaraan Paket C Setara SMA	DINAS PENDIDIKAN
		Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/Mts	DINAS PENDIDIKAN
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	DINAS PENDIDIKAN
		Meningkatnya Angka Lulusan SMP	DINAS PENDIDIKAN
		Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Kondisi Ruang Kelas Baik SD	DINAS PENDIDIKAN
		Ketersediaan sarana dan prasarana sekolah : Kondisi Keadaan Ruang Kelas Baik SMP	DINAS PENDIDIKAN
		Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Persentasi fasilitas yang dimiliki sekolah SD	DINAS PENDIDIKAN
		Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Persentasi fasilitas yang dimiliki sekolah SMP	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Angka partisipasi kasar	DINAS PENDIDIKAN
		Peningkatan Capaian Angka Lulusan Kesetaraan Paket A setara SD	DINAS PENDIDIKAN
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	DINAS PENDIDIKAN
		Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Persentasi fasilitas yang dimiliki sekolah SD	DINAS PENDIDIKAN
1.01.04.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV jenjang SD	DINAS PENDIDIKAN
		Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah	DINAS PENDIDIKAN

Lanjutan Tabel 8.

Kode	ASPEK/ URUSAN/ PROGRAM	Indikator Kinerja Program (outcome)	SKPD
1	2	3	11
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka kematian ibu (AKI)	DINAS KESEHATAN
		Angka kematian Bayi (AKB)	DINAS KESEHATAN
		Tercapainya Universal Health Coverage (UHC)	DINAS KESEHATAN
		Meningkatnya Status Gizi Balita	DINAS KESEHATAN
		Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit	DINAS KESEHATAN
		Meningkatnya jumlah Desa Open Defecation Free (ODF)	DINAS KESEHATAN
1.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Tenaga Kesehatan terhadap jumlah penduduk	DINAS KESEHATAN
1.02.04.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase TPM/TPP yang memenuhi syarat kesehatan	DINAS KESEHATAN
1.02.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah tangga ber PHBS	DINAS KESEHATAN
1.03.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1.03.02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase Berkurangnya luasan genangan akibat banjir	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.03.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.05.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tinggal bersanitasi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.06.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.08.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan berIMB per satuan bangunan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.09.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	persentase pemenuhan dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Terpeliharanya Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi Baik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Prosentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan liar	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Tersusunnya Informasi Database Jalan dan Jembatan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.11.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	persentase meningkatnya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase pemenuhan dokumen rencana rinci tata ruang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase ketaatan pemanfaatan ruang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.03.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan jumlah sambungan Rumah Air Minum	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.03.05.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan jumlah sambungan Rumah Air Limbah	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.03.08.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Prosentase Bangunan dan Gedung Yang Memiliki Sertifikat Laik Fungsi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		Rasio bangunan berIMB per satuan Bangunan	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Lanjutan Tabel 8.

Kode	ASPEK/ URUSAN/ PROGRAM	Indikator Kinerja Program (outcome)	SKPD
1	2	3	11
1.04.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN		
1.04.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Lingkungan Permukiman yang tertata	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		Prosentase Perencanaan Pembangunan Perumahan yng sesuai dengan NSPK	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.03.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Prosentase Lingkungan Permukiman Kumuh	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.04.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		Prosentase Lingkungan Permukiman Kumuh	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.05.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rasio Pemukiman Layak Huni	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yg didukung dengan PSU	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.06.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rasio Permukiman Layak Huni	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.10.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		
2.10.04.	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	prosentase penyelesaian konflik pertanahan di Kabupaten Cirebon	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.10.05.	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Prosentase kepemilikan tanah pemerintah daerah tertata dengan baik	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.10.06.	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.10.09.	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Tersedianya tanah untuk masyarakat	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.10.10.	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Penyelesaian izin lokasi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase peningkatan pemberantasan Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Porsentase pelayanan ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang dilaksanakan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Porsentase pemenuhan tenaga satuan perlindungan masyarakat	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Porsentase peningkatan Jumlah lokasi rawan Penyakit Masyarakat (Pekat) yang ditertibkan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Prosentase jumlah pelanggaran ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang terselesaikan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.04.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Penurunan Jumlah Kebakaran = Jumlah kebakaran yang tertangani/jumlah total kebakaran X 100%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Lanjutan Tabel 8.

Kode	ASPEK/ URUSAN/ PROGRAM	Indikator Kinerja Program (outcome)	SKPD
1	2	3	11
1.06.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
1.06.02.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Jumlah panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	DINAS SOSIAL
		Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani	DINAS SOSIAL
		Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang memiliki Pengetahuan dan Keterampilan	DINAS SOSIAL
1.06.03.	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani	DINAS SOSIAL
1.06.04.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Terehabilitasi	DINAS SOSIAL
1.06.05.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah Keluarga Miskin yang Menerima Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	DINAS SOSIAL
1.06.06.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dapat melaksanakan fungsi sosialnya	DINAS SOSIAL
		Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang memiliki Pengetahuan dan Keterampilan	DINAS SOSIAL
1.06.07.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Jumlah Taman Makam Pahlawan	DINAS SOSIAL
		Terpeliharanya di Lingkungan Taman Makam Pahlawan	DINAS SOSIAL
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.07.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		
2.07.02.	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Prosentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Berdasarkan Dokumen PTK : Tingkat Akurasi Indikator PTK	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.03.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Prosentase Tenaga Kerja bersertifikat Kompetensi	DINAS KETENAGAKERJAAN
		Tersajinya Dokumen	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.04.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Prosentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) propinsi	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.05.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Prosentase Perusahaan Yang Mendapatkan Tata Kelola Yang Layak	DINAS KETENAGAKERJAAN
3.32.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI		
3.32.03.	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	bertambahnya wilayah tujuan transmigrasi	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.09.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		
2.09.02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase LPM yang dimandirikan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2.09.03.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan terhadap jumlah kebutuhan pangan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
		Persentase kelompok pangan yang terkendali harganya	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
		Tingkat Keanekaragaman Konsumsi Pangan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2.09.04.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Berkurangnya daerah rawan pangan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2.09.05.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase PSAT aman dikonsumsi	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Lanjutan Tabel 8.

Kode	ASPEK/ URUSAN/ PROGRAM	Indikator Kinerja Program (outcome)	SKPD
1	2	3	11
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3.25. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
3.25.03.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
3.25.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
		Jumlah Produksi Pembenihan Ikan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
3.25.05.	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Tingkat kepatuhan pelaku usaha perikanan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
3.25.06.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi Pengolahan hasil Perikanan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
		Jumlah Konsumsi Ikan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2.11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2.11.02.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya dokumen perencanaan lingkungan hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase hasil pemantauan kualitas air yang memenuhi baku mutu	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Persentase Tutupan Lahan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya keanekaragaman hayati	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan di bidang lingkungan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kegiatan peduli lingkungan yang dilakukan masyarakat	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.09.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya partisipasi masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya pelayanan penanganan pengaduan masyarakat	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Prosentase Cakupan Pelayanan pengelolaan sampah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Prosentase Timbulan Sampah yang Terkurangi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Lanjutan Tabel 8.

Kode	ASPEK/ URUSAN/ PROGRAM	Indikator Kinerja Program (outcome)	SKPD
1	2	3	11
2.12.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN		
2.12.02.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Jumlah Keluarga yang sudah memiliki Dokumen Kependudukan lengkap (Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik / KTP E)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Prosentase jumlah penduduk di Kabupaten Cirebon yang sudah melaksanakan perekaman KTP E	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Prosentase Keluarga yang sudah memiliki Dokumen Akta Kelahiran	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Prosentase pemenuhan pelayanan Akta-akta pencatatan sipil	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Prosentase Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Jumlah OPD dan Desa yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Peningkatan kualitas Database Kependudukan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.05.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Update Penyediaan Data Profil Kependudukan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.13.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN		
2.13.02.	PROGRAM PENATAAN DESA	Meningkatnya jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam proses pembangunan dari perencanaan sampai implementasi	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Persentase (%) Peningkatan Jumlah Desa yang di fasilitasi Penataan Kewenangan Desanya	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.03.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Meningkatnya jumlah desa yg melakukan kerja sama dalam proses pembangunan	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Jumlah Desa dengan penilaian baik (perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Meningkatnya jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam proses pembangunan dari perencanaan sampai implementasi	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Meningkatnya jumlah desa yang ketahanan ekonominya baik	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Meningkatnya jumlah desa yang ketahanan ekonominya baik	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.08.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN		
2.08.02.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Lembaga / Kelompok berbasis gender yang mendapatkan penguatan	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Proporsi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Lanjutan Tabel 8.

Kode	ASPEK/ URUSAN/ PROGRAM	Indikator Kinerja Program (outcome)	SKPD
1	2	3	11
2.08.03.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Presentase perempuan yang mendapat perlindungan	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya ketahanan keluarga yang ditandai dengan menurunnya angka perceraian	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.05.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Pelaksanaan pengumpulan data terpilah gender	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Presentase anak yang mendapat perlindungan	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Jumlah layanan korban kekerasan	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN		
2.14.02.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	tersediannya informasi data keluarga	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.03.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Presentase jumlah Apseptor MKJP	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Persentase masyarakat dalam Keikutsertaan ber- KB	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Meningkatnya jumlah pendidik/Motivator sebaya	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Lanjutan Tabel 8.

Kode	ASPEK/ URUSAN/ PROGRAM	Indikator Kinerja Program (outcome)	SKPD
1	2	3	11
		Pembinaan Kampung KB (Keluarga Berkualitas) dengan ditandai peningkatan status	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Tingkat Kesehatan Reproduksi Remaja	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.14.04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan anggota Bina Keluarga (BKB/BKR/BKL) ber-KB	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		-	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.15.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		
2.15.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya Prosentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas serta tatakelola sektor perhubungan yang sesuai dengan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria)	DINAS PERHUBUNGAN
		Rasio sarana dan Prasarana Pengujian yang layak	DINAS PERHUBUNGAN
		Prosentase jumlah pelanggaran lalu lintas	DINAS PERHUBUNGAN
		Rasio Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan (Halte dan Terminal) yang layak fungsi	DINAS PERHUBUNGAN
		Persentase ketersediaan sarana dan Prasarana Pengamanan Lalu Lintas yang berfungsi dengan baik	DINAS PERHUBUNGAN
		Persentase kepemilikan KIR/Wajib Uji angkutan Umum	DINAS PERHUBUNGAN
		Meningkatnya Prosentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas serta tatakelola sektor perhubungan yang sesuai dengan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria).	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.03.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Meningkatnya prosentase pemenuhan Perijinan	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Presentasi Perijinan landasan	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.05.	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Prosentasi ijin pintu perlintasan kereta api di kabupaten	DINAS PERHUBUNGAN
2.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2.16.02.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase layanan informasi dan komunikasi publik	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Indeks aspek teknologi informasi dan komunikasi	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Cakupan pengelolaan aplikasi informatika	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Lanjutan Tabel 8.

Kode	ASPEK/ URUSAN/ PROGRAM	Indikator Kinerja Program (outcome)	SKPD
1	2	3	11
2.20.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		
2.20.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase dokumen hasil pengolahan dan analisis statistik sektoral yang dihasilkan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Persentase ketersediaan data statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Cirebon	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		
2.21.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Tingkat keamanan informasi pemerintah	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.17.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN		
2.17.02.	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Terciptanya Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.03.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Terciptanya Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Prosentase koperasi yang meningkat predikat Tingkat Kesehatan hasil pengawasan	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.04.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.05.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Prosentase pengurus, pengawas, manajer dan pengelola koperasi yang bersertifikat kompetensi	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.06.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Laju perkembangan usaha produktif koperasi	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.07.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Prosentase Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.08.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro Yang Berkembang Nilai Produksinya/ Omsetnya	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.18.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		
2.18.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Jenis Pelayanan Perizinan Berbasis Online	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Jenis Pelayanan Perizinan Yang Sudah Dilimpahkan dan Efektif Dilaksanakan di Kecamatan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Rata-Rata Lama Perizinan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Jumlah Tenaga Kerja Lokal Yang Terserap	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Tenaga Kerja Lokal Yang Terserap	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Rata-Rata Lama Perizinan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Lanjutan Tabel 8.

Kode	ASPEK/ URUSAN/ PROGRAM	Indikator Kinerja Program (outcome)	SKPD
1	2	3	11
2.19.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
2.19.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Prosentase daya saing Kepemudaan	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Pembinaan olahraga	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.04.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Prosentase pemuda yang aktif dalam kepramukaan	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.22.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
2.22.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Prosentase pertumbuhan pelaku budaya	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Prosentase pertumbuhan jumlah sanggar kesenian tradisional	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.04.	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cerita Sejarah yang di Seminarkan	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.05.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Penambahan penetapan cagar budaya	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.06.	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Bertambahnya koleksi museum	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		
3.26.02.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah obyek daya tarik wisata dengan pertumbuhan kunjungan diatas 10%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.03.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Market Share Kunjungan Pariwisata Kabupaten Cirebon Terhadap Kunjungan Provinsi Jawa Barat	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.04.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah HKI ekonomi kreatif	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.05.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang terstandarisasi/bersertifikat	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.23.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		
2.23.02.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Prosentase Peningkatan Perpustakaan Desa yang aktif	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		Prosentase peningkatan minat dan budaya baca masyarakat	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		Prosentase Perpustakaan SMPN sesuai standar Nasional Perpustakaan	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.23.03.	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Prosentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Lanjutan Tabel 8.

Kode	ASPEK/ URUSAN/ PROGRAM	Indikator Kinerja Program (outcome)	SKPD
1	2	3	11
2.24.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		
2.24.02.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Presentase peningkatan SKPD yang menerapkan sistem administrasi kearsipan secara baku	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		Presentase peningkatan khasanah arsip daerah	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		Meningkatnya durasi dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		Presentase SKPD yang Tata kelola arsipnya sesuai NSPK	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.03.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Presentase ketersediaan arsip yang terlindungi dan terselamatkan	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.04.	PROGRAM PERIJINAN PENGUNAAN ARSIP	Presentase peningkatan SKPD yang menerapkan sistem administrasi kearsipan secara baku	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		Presentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
3.27.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		
3.27.02.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Komoditas Tanaman Pangan (Beras)	DINAS PERTANIAN
		Jumlah Produksi Sektor Peternakan (Sapi Potong, Ayam Ras, Unggas Lokal dan Domba)	DINAS PERTANIAN
		Jumlah Produksi Komoditas Perkebunan (Gula dan Kelapa)	DINAS PERTANIAN
		Jumlah Populasi Ternak	DINAS PERTANIAN
		Jumlah Produksi Komoditas Hortikultura (Bawang Merah, Cabai Besar dan Mangga)	DINAS PERTANIAN
		Rasio Ketersediaan Sarana Produksi Pertanian	DINAS PERTANIAN
3.27.03.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Komoditas Tanaman Pangan (Beras)	DINAS PERTANIAN
		Jumlah Produksi Sektor Peternakan (Sapi Potong, Ayam Ras, Unggas Lokal dan Domba)	DINAS PERTANIAN
		Jumlah Produksi Komoditas Hortikultura (Bawang Merah, Cabai Besar dan Mangga)	DINAS PERTANIAN
		Rasio Ketersediaan Prasarana Produksi Pertanian	DINAS PERTANIAN
3.27.04.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Presentase Penurunan Frekuensi Kemunculan Penyakit Zoonosis	DINAS PERTANIAN
		Kejadian/Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (Satuan Ternak)	DINAS PERTANIAN
3.27.05.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Komoditas Tanaman Pangan (Beras)	DINAS PERTANIAN
		Rasio Tingkat Keberhasilan Penanggulangan Bencana Pertanian per-tahun	DINAS PERTANIAN
3.27.06.	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah Produksi Komoditas Hortikultura (Bawang Merah, Cabai Besar dan Mangga)	DINAS PERTANIAN
		Rasio Jumlah Usulan Izin Usaha Pertanian	DINAS PERTANIAN
3.27.07.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Presentase Kelompok Petani Yang Naik Kelas	DINAS PERTANIAN
		Presentase Penyuluh Yang Lulus Pelatihan Berbasis Kompetensi	DINAS PERTANIAN
		Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar	DINAS PERTANIAN
3.30.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		
3.30.03.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan bina pengelola pasar	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		Penerimaan Retribusi Pasar	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		Jumlah sarana distribusi perdagangan yang sesuai SNI (Pasar Pemda)	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Lanjutan Tabel 8.

Kode	ASPEK/ URUSAN/ PROGRAM	Indikator Kinerja Program (outcome)	SKPD
1	2	3	11
3.30.04.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pencapaian Stabilitas harga 9 komoditas kebutuhan pokok masyarakat (daging sapi, beras, gula pasir, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, kedelai, tepung terigu, dan bawang merah)	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		Koefisien varian antar waktu kebutuhan pokok dan barang penting	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.30.05.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor ke luar Negri	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.30.06.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan UTTP yang ditera	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		Penerimaan Retribusi Tera	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.30.07.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Nilai perdagangan dalam negeri	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.31.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		
3.31.02.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan cluster industri	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		Jumlah produk IKM yang bersertifikasi	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		Jumlah sentra industri yang dikembangkan	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		Persentase Pencapaian Sasasaran Pembangunan Industri termasuk turunan pembangunan industri dalam RPIK	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.31.04.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jenis Penerapan Teknologi Industri	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		Persentase data perusahaan industri menengah dan perusahaan Kawasan industri di kabupaten/kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri Kecil, Menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.01.	PERENCANAAN		
5.01.02.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	prosentase ketersediaan data perencanaan pembangunan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		prosentase jumlah dokumen Evaluasi Pembangunan Kabupaten Cirebon	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Meningkatnya SKPD dalam menetapkan IKU dan Perkin	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Prosentase peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Lanjutan Tabel 8.

Kode	ASPEK/ URUSAN/ PROGRAM	Indikator Kinerja Program (outcome)	SKPD
1	2	3	11
5.01.03.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase pencapaian kinerja perencanaan pembangunan bidang fispra	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Jumlah rekomendasi kebijakan, hasil kajian dari hasil perencanaan bidang pemerintahan dan sosial budaya yang harus dilaksanakan oleh SKPD terkait	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan perangkat daerah lingkup koordinasi bidang ekonomi yang memenuhi target	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Prosentase capaian kinerja program perangkat daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Prosentase rata rata pencapaian Target kinerja outcome program pada Perangkat Daerah lingkup koordinasi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5.05.02.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Prosentase hasil penelitian pemerintahan, sosial, ekonomi dan pembangunan yang diimplementasikan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Prosentase inovasi dan kreativitas daerah yang diaplikasikan (diterapkan)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Prosentase pemanfaatan hasil kelitbangan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.02.02.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Peningkatan Pengembangan Wilayah untuk mengurangi dampak resiko bencana, kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Pembangunan	PPKD
5.02.	KEUANGAN		
5.02.02.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengelola keuangan dan barang daerah	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Ketepatan waktu penyusunan Raperda dan Raperbup APBD	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Ketepatan waktu penyusunan Raperda dan Raperbup Perubahan APBD	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Peningkatan pengelolaan administrasi kas daerah secara tepat waktu dan tepat sasaran	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyajian laporan keuangan serta penyajian laporan aset tetap	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Peningkatan barang milik daerah yang telah dan atau dalam proses sertifikasi serta terinventarisir dan dimanfaatkan dengan baik/benar	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Ketepatan waktu penyusunan Raperda dan Raperbup APBD	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Peningkatan Penyajian Laporan Barang Milik Daerah yang sudah Terinventarisasi, Teridentifikasi dan Terdokumentasi dengan Baik dan Benar	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyajian laporan keuangan serta penyajian laporan aset tetap	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengelola keuangan dan barang daerah	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatkan penerimaan pajak daerah	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Lanjutan Tabel 8.

Kode	ASPEK/ URUSAN/ PROGRAM	Indikator Kinerja Program (outcome)	SKPD
1	2	3	11
5.03.	KEPEGAWAIAN		
5.03.02.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Aparatur yang difasilitasi kesejahteraannya	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur Berbasis Sistem	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Persentase Sumber Daya Aparatur Yang ditingkatkan Kompetensinya	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian sesuai SOP	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Persentase pegawai yang ditempatkan di bidangnya	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Persentase Aparatur yang ditingkatkan integritasnya	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
5.04.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Sumber Daya Aparatur Yang ditingkatkan Kompetensinya	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
6.01.	INSPEKTORAT DAERAH		
6.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	INSPEKTORAT
6.01.03.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	INSPEKTORAT
		Meningkatnya Kapabilitas APIP	INSPEKTORAT
		persentase peningkatan SDM Pengawas berkompeten	INSPEKTORAT
4.02.	SEKRETARIAT DPRD		
4.02.02.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Presentase jumlah raperda yang dibahas dan ditetapkan tepat waktu	SEKRETARIAT DPRD
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4.01.	SEKRETARIAT DAERAH		
4.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Presentase Kerjasama yang ditandatangani	SEKRETARIAT DAERAH
		Presentase batas wilayah administrasi antar desa dan Daerah yang Ditetapkan	SEKRETARIAT DAERAH
		Presentase fasilitasi pengelolaan kekayaan desa	SEKRETARIAT DAERAH
		Presentase Produk Hukum/Informasi Hukum yang di publikasikan pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	SEKRETARIAT DAERAH
		Presentase Koordinasi yang Dilakukan Di Bagian Kesejahteraan Rakyat	SEKRETARIAT DAERAH
		Presentase Money yang Dilakukan Bagian Kesejahteraan Rakyat	SEKRETARIAT DAERAH
		Presentase Tindakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan	SEKRETARIAT DAERAH
		Presentase Pelayanan Fasilitasi Kewenangan Terhadap Kepala/Wakil Kepala Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
		Presentase Kualitas Kehidupan Keagamaan Yang Ditingkatkan	SEKRETARIAT DAERAH
		Presentase Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan	SEKRETARIAT DAERAH
		Presentase Peningkatan Kegiatan Bina Kewilayahan yang Dilakukan	SEKRETARIAT DAERAH
		Presentase Peraturan Perundang - undangan yang ditetapkan	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Presentase Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berkualitas	SEKRETARIAT DAERAH
		Presentase Koordinasi yang Dilakukan Bagian Sumber Daya Alam	SEKRETARIAT DAERAH
		Presentase Keberhasilan Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
		Presentase kebijakan Pembangunan Daerah yang Dilaksanakan	SEKRETARIAT DAERAH
		Presentase Koordinasi dalam Meningkatkan Perekonomian	SEKRETARIAT DAERAH

Tabel 9. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs

INDIKATOR TPB
Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.
Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.
Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.
Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.
Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.
Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.
Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.
Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.
Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.
Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.
Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.
Pendampingan psikososial korban bencana sosial.
Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB= Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)
Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.
Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.
Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.
Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.
Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).
Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.
Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.
Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.
Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.
Prevalensi anemia pada ibu hamil.
Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.
Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.
Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).
Angka Kematian Ibu (AKI).
Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.
Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.
Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.
Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.

Lanjutan Tabel 9.

INDIKATOR TPB
Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.
Prevalensi HIV pada populasi dewasa.
Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.
Kejadian Malaria per 1000 orang.
Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.
Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.
Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).
Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.
Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis
Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.
Prevalensi tekanan darah tinggi.
Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.
Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.
Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.
Prevalensi penyalahgunaan narkoba.
Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.
Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.
Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.
Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.
Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).
Total Fertility Rate (TFR).
Unmet need pelayanan kesehatan.
Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.
Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Proporsi kematian akibat keracunan.
Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.
Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.
Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.
Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.
Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.
Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.
Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.
Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.
Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.
Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).
Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.
Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.
Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.
Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.
Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.

INDIKATOR TPB
Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.
Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.
Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.
Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.
Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.
Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.
Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).
Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.
Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.
Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.
Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.
Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.
Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).
Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.
Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.
Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.
Kualitas air danau.
Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.
Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.
Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.
Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.
Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.
Bauran energi terbarukan.
Intensitas energi primer.
Laju pertumbuhan PDB per kapita.
PDB per kapita.
Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.
Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.
Persentase tenaga kerja formal.
Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.
Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.
Upah rata-rata per jam pekerja.
Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.
Tingkat setengah pengangguran.
Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).
Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.
Jumlah wisatawan mancanegara.
Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.
Jumlah devisa sektor pariwisata.
Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.

INDIKATOR TPB
Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.
Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.
Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.
Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.
Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.
Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.
Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).
Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.
Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.
Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.
Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.
Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.
Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).
Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.
Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.
Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.
Kualitas air danau.
Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.
Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.
Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.
Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.
Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.
Bauran energi terbarukan.
Intensitas energi primer.
Laju pertumbuhan PDB per kapita.
PDB per kapita.
Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.
Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.
Persentase tenaga kerja formal.
Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.
Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.
Upah rata-rata per jam pekerja.
Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.
Tingkat setengah pengangguran.
Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).
Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.
Jumlah wisatawan mancanegara.
Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.
Jumlah devisa sektor pariwisata.
Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.

Lanjutan Tabel 9.

INDIKATOR TPB
Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa
Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).
Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.
Panjang pembangunan jalan tol.
Panjang jalur kereta api.
Jumlah dermaga penyeberangan.
Jumlah pelabuhan strategis.
Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.
Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.
Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.
Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.
Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.
Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.
Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.
Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam
Proporsi individu yang menggunakan internet
Koefisien Gini.
Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.
Jumlah desa tertinggal.
Jumlah Desa Mandiri.
Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.
Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.
Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.
Indeks Kebebasan Sipil.
Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.
Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.
Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).
Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).
Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.
Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.
Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).
Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.
Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.
Persentase sampah perkotaan yang tertangani.
Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.
Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.
Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.
Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).
Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.
Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.
Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.
Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.
Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.
Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.

Lanjutan Tabel 9.

INDIKATOR TPB
Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.
Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.
Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.
Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.
Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.
Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.
Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.
Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.
Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.
Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.
Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.
Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).
Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.
Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).
Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).
Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.
Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).
Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).
Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).
Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.
Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.
Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.
Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.
Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.
Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.
Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.
Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.
Proporsi penduduk terlayani mobile broadband
Proporsi individu yang menggunakan internet.
Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.
Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.
Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.
Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).
Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.
Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)
Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.
Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).

Dari penetapan indikator tersebut di atas, diidentifikasi menjadi Daftar Data yang harus dikumpulkan oleh semua Produsen Data (**Lampiran 3**). Selanjutnya data yang dihasilkan dikategorikan per sektor dan dibuatkan metadatanya. Untuk keperluan *uploading* dalam portal Open Data Kabupaten Cirebon, dibuatkan *template* tabel dengan mengacu pada ketentuan Standar Data yang dikeluarkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.

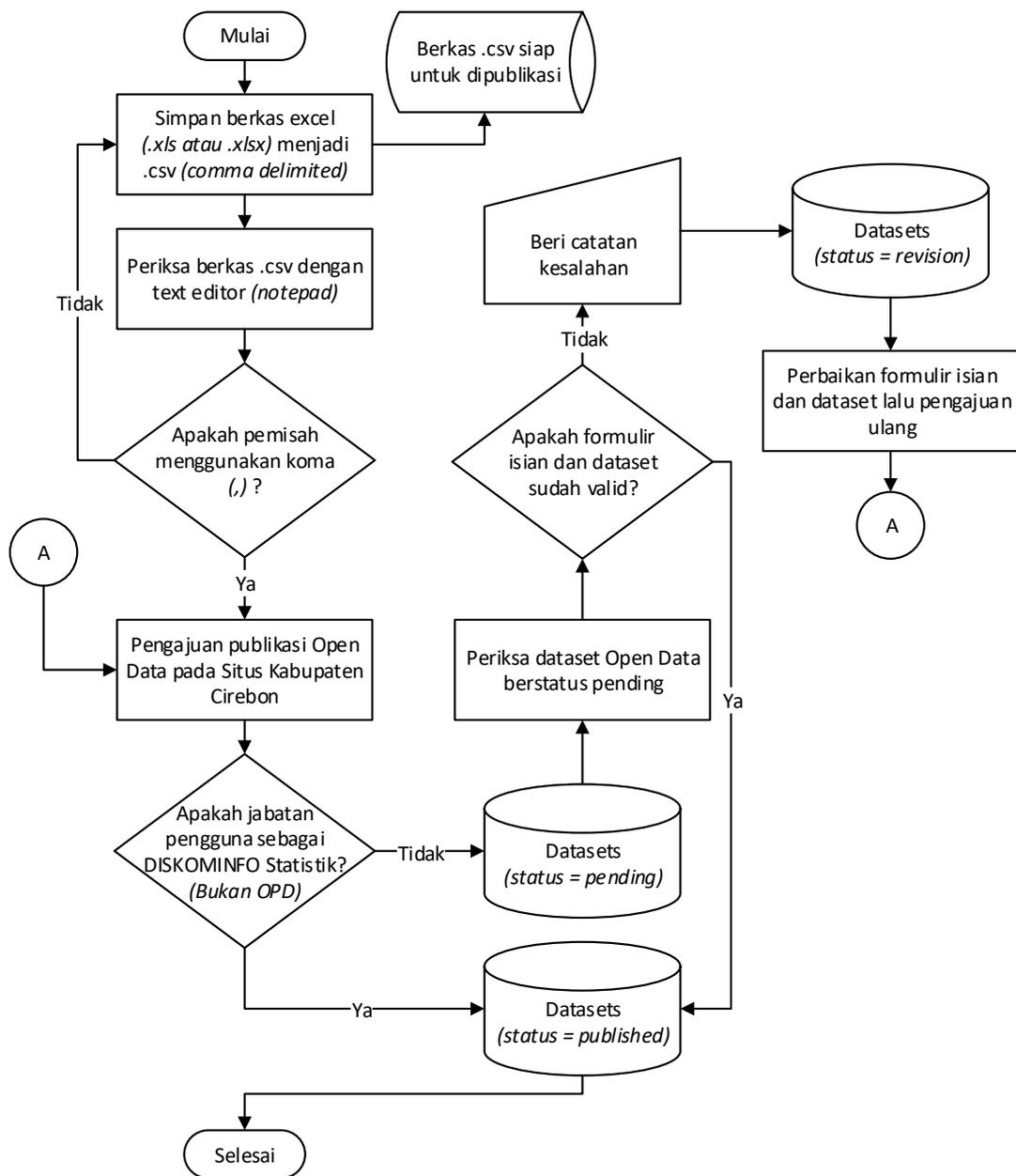
IV. MANAJEMEN BASIS DATA

Manajemen Basis Data dilaksanakan untuk menyediakan Basis Data yang: (a) Menjamin penyimpanan Data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagipakaikan di Pusat Data Nasional; (b) Menjamin ketersediaan akses Data yang terus menerus; dan (c) Menjaga keamanan Data dari akses yang tidak sesuai ketentuan tata kelola Data atau peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan Data. Kegiatan Manajemen Basis Data mencakup: (a) Mendefinisikan kebutuhan Walidata dan Produsen Data untuk Basis Data; (b) Mengelola Basis Data di Pusat Data Nasional; (c) Melakukan pemeriksaan Basis Data untuk kesesuaian dengan prinsip Satu Data Indonesia; (d) Menyebarluaskan Basis Data melalui Portal Satu Data Indonesia; (e) Membuat cadangan dan distribusi Basis Data; dan (f) Merencanakan dan mengelola perbaruan Basis Data.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Cirebon mempunyai Data Center yang terpusat di Kantor Diskominfo Kabupaten Cirebon, terdiri dari 63 server dalam 18 rak, UPS berjumlah 5 unit dan firewall 4 unit. Kapasitas data center yaitu Rockmount 25 unit 42U dan Bandwidth 2 GB/S. Terdapat perangkat lunak penyebarluasan data (WMS) dan Perangkat lunak penyebarluasan metadata (CSW). Selain server Diskominfo, dalam Data Center juga terdapat beberapa server milik Perangkat Daerah lainnya untuk keperluan penyimpanan database masing-masing Perangkat Daerah.

Manajemen database yang dilakukan terdiri dari data statistik sektoral dan geospasial. Untuk data statistik sektoral, pengelolaan data menggunakan aplikasi Open Data dalam website Cirebonkab dengan server tersimpan dalam Data Center Diskominfo, sedangkan data geospasial menggunakan aplikasi <http://cirebonkab.ina-sdi.or.id> yang terkoneksi di geoportal nasional di <https://tanahair.indonesia.go.id/portal-web/>.

Manajemen basis data statistik sektoral dalam aplikasi Open Data Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:



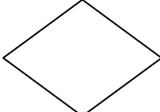
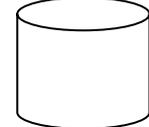
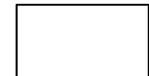
Gambar 2. Flow Chart Manajemen Basis Data Statistik Sektoral dalam Open Data Kabupaten Cirebon

Penjelasan:

1. Mulai
2. Proses: Simpan berkas excel (.xls atau .xlsx) menjadi .csv (comma delimited)
 - a. Penyimpanan: Berkas .csv siap untuk dipublikasi
3. Proses: Periksa berkas .csv dengan text editor (notepad)

4. Keputusan: Apakah pemisah menggunakan koma (,)?
 - a. Ya: Lanjut ke nomor 5
 - b. Tidak: Kembali ke nomor 2
5. Proses: Pengajuan publikasi Open Data pada Situs Kabupaten Cirebon
6. Keputusan: Apakah jabatan pengguna sebagai DISKOMINFO Statistik? (Bukan OPD)
 - a. Ya:
 - i. Basis Data: Datasets (status = published)
 - ii. Lanjut ke nomor 9
 - b. Tidak:
 - i. Basis Data: Datasets (status = pending)
 - ii. Lanjut ke nomor 7
7. Proses: Periksa dataset Open Data berstatus pending
8. Keputusan: Apakah formulir isian dan dataset sudah valid?
 - a. Ya:
 - i. Basis Data: Datasets (status = published)
 - ii. Lanjut ke nomor 9
 - b. Tidak:
 - i. Masukkan Manual: Bericatatankesalahan
 - ii. Basis Data: Datasets (status = revision)
 - iii. Proses: Perbaikatformulirisian dan dataset lalupengajuanulang
 - iv. Kembalike nomor 5
9. Selesai

Penjelasan diagram flowchart yang digunakan:

Diagram	Nama
	Terminator (Mulai - Selesai)
	Hard Disk (Penyimpanan)
	Decision (Keputusan)
	Manual Input (Masukkan Manual)
	Database (Basis Data)
	Process (Proses)

V. MANAJEMEN KUALITAS DATA

Manajemen Kualitas Data dilaksanakan untuk menjamin Data yang dihasilkan Produsen Data yang: (a) Memenuhi prinsip Satu Data Indonesia; dan (b) Diperbarui sesuai dengan jadwal pemutakhiran data. Kegiatan Manajemen Kualitas Data melingkupi kegiatan untuk: (a) Mengembangkan dan mempromosikan kesadaran kualitas Data; (b) Menentukan persyaratan kualitas Data; (c) Menetapkan profil, analisis, dan nilai kualitas Data; (d) Menentukan matriks kualitas Data; (e) Menentukan aturan bisnis kualitas Data; (f) Menguji dan memvalidasi persyaratan kualitas Data; (g) Menetapkan dan mengevaluasi tingkat layanan kualitas Data; dan (h) Mengukur dan memantau kualitas Data secara berkelanjutan.

Manajemen kualitas data di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama di level Produsen Data, dimana setiap Perangkat Daerah memeriksa data yang dikumpulkan sebelum diserahkan ke Walidata atau sebelum *inputting* data ke aplikasi Open Data. Tahap kedua di level Walidata, dimana Walidata memeriksa data yang dikirim oleh Produsen Data sesuai Prinsip Satu Data Indonesia. Jika data yang dikirimkan atau diinput oleh Produsen Data sudah sesuai dengan Prinsip Satu Data, maka akan dilakukan approval ke dalam aplikasi Open Data. Sebaliknya, jika tidak sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia, maka data akan ditolak dan dikembalikan kepada Produsen Data untuk diperbaiki.

Untuk meningkatkan kualitas data, Diskominfo juga melakukan standar data dengan mengacu pada petunjuk pelaksanaan standar data yang dikeluarkan oleh Diskominfo Provinsi Jawa Barat. Standar data ini dilakukan untuk menyeragamkan format dan memenuhi standar kualitas data.

Lampiran 1. Format Metadata Kegiatan, Indikator dan Variabel Statistik Sektoral



MS-Keg

METADATA STATISTIK KEGIATAN

Judul Kegiatan:		Tahun:	
Kode Kegiatan (diisi oleh petugas):			
Cara Pengumpulan Data:		<input type="checkbox"/>	
Pencacahan Lengkap	- 1	Kompilasi Produk Administrasi	- 3
Survei	- 2	Cara lain sesuai dengan perkembangan TI	- 4
Sektor Kegiatan:		<input type="checkbox"/>	
Pertanian dan Perikanan	- 1	Perdagangan Internasional dan Neraca Perdagangan	- 12
Demografi dan Kependudukan	- 2	Ketenagakerjaan	- 13
Pembangunan	- 3	Neraca Nasional	- 14
Proyeksi Ekonomi	- 4	Indikator Ekonomi Bulanan	- 15
Pendidikan dan Pelatihan	- 5	Produktivitas	- 16
Lingkungan	- 6	Harga dan Paritas Daya Beli	- 17
Keuangan	- 7	Sektor Publik, Perpajakan, dan Regulasi Pasar	- 18
Globalisasi	- 8	Perwilayahan dan Perkotaan	- 19
Kesehatan	- 9	Ilmu Pengetahuan dan Hak Paten	- 20
Industri dan Jasa	- 10	Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan	- 21
Teknologi Informasi dan Komunikasi	- 11	Transportasi	

Jika survei statistik sektoral, apakah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS?

Ya - 1

Tidak - 2

Jika "Ya", **Identitas Rekomendasi:**

I. PENYELENGGARA

1.1. Instansi Penyelenggara:

1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara:

Telepon : Faksimile :

E-mail :

II. PENANGGUNG JAWAB

2.1. Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1 :

Eselon 2 :

2.2. Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3)

Jabatan :

Alamat :

Telepon : Faksimile :

E-mail :

III. PERENCANAAN DAN PERSIAPAN

3.1. Latar Belakang Kegiatan:

3.2. Tujuan Kegiatan:

3.3. Rencana Jadwal Kegiatan:

	Awal (tgl/bln/thn)				Akhir (tgl/bln/thn)		
A. Perencanaan							
1. Perencanaan Kegiatan				s.d.			
2. Desain				s.d.			
B. Pengumpulan							
3. Pengumpulan Data				s.d.			
C. Pemeriksaan							
4. Pengolahan Data				s.d.			
D. Penyebarluasan							
5. Analisis				s.d.			
6. Diseminasi Hasil				s.d.			
7. Evaluasi				s.d.			

3.4. Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:

No.	Nama Variabel (Karakteristik)	Referensi Waktu (Periode Enumerasi)

IV. DESAIN KEGIATAN

4.1. Kegiatan ini dilakukan:

Hanya sekali - 1 → langsung ke R.4.3. Berulang - 2

4.2. Jika “berulang” (R.4.1. berkode 2), Frekuensi Penyelenggaraan:

Harian	- 1	Empat Bulanan	- 5
Mingguan	- 2	Semesteran	- 6
Bulanan	- 3	Tahunan	- 7
Triwulanan	- 4	> Dua Tahunan	- 8

4.3. Tipe Pengumpulan Data:

Longitudinal Panel - 1
Longitudinal Cross Sectional - 2
Cross Sectional - 3

4.4. Cakupan Wilayah Pengumpulan Data:

Seluruh Wilayah Indonesia - 1 → langsung ke R.4.6.
 Sebagian Wilayah Indonesia - 2

4.5. Jika “sebagian wilayah Indonesia” (R.4.4. berkode 2), Wilayah Kegiatan:

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota

4.6. Metode Pengumpulan Data:

Wawancara - 1
 Mengisi kuesioner sendiri (swacakah) - 2
 Pengamatan (observasi) - 4
 Pengumpulan data sekunder - 8
 Lainnya (sebutkan) - 16

4.7. Sarana Pengumpulan Data:		<input type="checkbox"/>
<i>Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI)</i>	- 1	
<i>Computer-assisted Personal Interviewing (CAPI)</i>	- 2	
<i>Computer-assisted Telephones Interviewing (CATI)</i>	- 4	
<i>Computer Aided Web Interviewing (CAWI)</i>	- 8	
<i>Mail</i>	- 16	
Lainnya (sebutkan)	- 32	

4.8. Unit Pengumpulan Data:		<input type="checkbox"/>
Individu	- 1	
Rumah tangga	- 2	
Usaha/perusahaan	- 4	
Lainnya (sebutkan)	- 8	

V. DESAIN SAMPEL
Diisi jika cara pengumpulan data adalah survei sebagian

5.1. Jenis Rancangan Sampel:		<input type="checkbox"/>
<i>Single Stage/Phase</i>	- 1	
<i>Multi Stage/Phase</i>	- 2	

5.2. Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir:		<input type="checkbox"/>
Sampel Probabilitas	- 1 → ke R.5.3.a	
Sampel Nonprobabilitas	- 2 → ke R.5.3.b	

5.3. Jika “sampel probabilitas” (R.5.2. berkode 1), Metode yang Digunakan:		<input type="checkbox"/>
<i>Simple Random Sampling</i>	- 1	} → ke R.5.4
<i>Systematic Random Sampling</i>	- 2	
<i>Stratified Random Sampling</i>	- 3	
<i>Cluster Sampling</i>	- 4	
<i>Multi Stage Sampling</i>	- 5	
Jika “sampel nonprobabilitas” (R.5.2. berkode 2), Metode yang Digunakan:		
<i>Quota Sampling</i>	- 6	} → ke R.5.7
<i>Accidental Sampling</i>	- 7	
<i>Purposive Sampling</i>	- 8	
<i>Snowball Sampling</i>	- 9	
<i>Saturation Sampling</i>	- 10	

5.4. Kerangka Sampel Tahap Terakhir:		<input type="checkbox"/>
<i>List Frame</i>	- 1	
<i>Area Frame</i>	- 2	
5.5. Fraksi Sampel Keseluruhan:		
5.6. Nilai Perkiraan <i>Sampling Error</i> Variabel Utama:		
5.7. Unit Sampel:		
5.8. Unit Observasi:		
VI. PENGUMPULAN DATA		
6.1. Apakah Melakukan Uji Coba (<i>Pilot Survey</i>)?		<input type="checkbox"/>
Ya	- 1	
Tidak	- 2	
6.2. Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data:		<input type="checkbox"/>
Kunjungan kembali (<i>revisit</i>)	- 1	<i>Task Force</i> - 4
Supervisi	- 2	Lainnya (sebutkan) - 8
6.3. Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?		<input type="checkbox"/>
Ya	- 1	
Tidak	- 2	
<p>Pertanyaan 6.4 – 6.7 ditanyakan jika sarana pengumpulan data adalah PAPI, CAPI, atau CATI</p> <p>(Pilihan R.4.7. kode 1, 2, dan/atau 4 dilingkari)</p>		
6.4. Petugas Pengumpulan Data:		<input type="checkbox"/>
Staf instansi penyelenggara	- 1	
Mitra/tenaga kontrak	- 2	
Staf instansi penyelenggara dan mitra/tenaga kontrak	- 3	

6.5. Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data:		<input type="checkbox"/>
≤ SMP	- 1	
SMA/SMK	- 2	
Diploma I/II/III	- 3	
Diploma IV/S1/S2/S3	- 4	
6.6. Jumlah Petugas:		
Supervisor/penyelia/pengawas orang	
Pengumpul data/enumerator orang	
6.7. Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?		<input type="checkbox"/>
Ya	- 1	
Tidak	- 2	
VII. PENGOLAHAN DAN ANALISIS		
7.1. Tahapan Pengolahan Data:		<input type="checkbox"/>
Penyuntingan (<i>Editing</i>)	Ya - 1 Tidak - 2	<input type="checkbox"/>
Penyandian (<i>Coding</i>)	Ya - 1 Tidak - 2	<input type="checkbox"/>
<i>Data Entry</i>	Ya - 1 Tidak - 2	<input type="checkbox"/>
Penyahihan (Validasi)	Ya - 1 Tidak - 2	<input type="checkbox"/>
7.2. Metode Analisis:		<input type="checkbox"/>
Deskriptif	- 1	
Inferensia	- 2	
Deskriptif dan Inferensia	- 3	
7.3. Unit Analisis:		<input type="checkbox"/>
Individu	- 1 Usaha/perusahaan	
Rumah tangga	- 2 Lainnya (sebutkan)	- 8
7.4. Tingkat Penyajian Hasil Analisis:		<input type="checkbox"/>
Nasional	- 1 Kecamatan	
Provinsi	- 2 Lainnya (sebutkan)	- 16
Kabupaten/Kota	- 4	
VIII. DISEMINASI HASIL		
8.1. Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum:		<input type="checkbox"/>
Tercetak (<i>hardcopy</i>)	Ya - 1 Tidak - 2	<input type="checkbox"/>
Digital (<i>softcopy</i>)	Ya - 1 Tidak - 2	<input type="checkbox"/>
Data Mikro	Ya - 1 Tidak - 2	<input type="checkbox"/>

8.2. Jika pilihan R.8.1. kode 1, Rencana Rilis Produk Kegiatan:

	Tanggal	Bulan	Tahun
Tercetak			
Digital			
Data Mikro			

_____, _____ 20__

Mengetahui,
Direktur/Kepala Biro

NIP.



Badan Pusat Statistik

FS3

FORMULIR PEMBERITAHUAN
SURVEI STATISTIK SEKTORAL

Judul Survei :

Identitas Rekomendasi (diisi oleh BPS)

Pedoman Pengisian Kuesioner Statistik Sektor (FS3)

Tuliskan judul survei yang akan dilaksanakan secara lengkap pada tempat yang disediakan.

Blok I. Identifikasi Penyelenggaraan Survei

1.1. Instansi Pemerintah Penyelenggara

Tuliskan nama instansi pemerintah (kementerian/lembaga/perangkat daerah) penyelenggara survei ini dan dituliskan setingkat dengan eselon II, misal *Kementerian Komunikasi dan Informatika, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika,*

1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara

Tuliskan dengan lengkap alamat instansi pemerintah penyelenggara (termasuk nomor telepon, faksimile, dan email). Contoh :

Jl. Merdeka Barat No. 17 Gedung Sapta Pesona Jakarta 10110

Kabupaten/Kota : Kota Jakarta Pusat

Provinsi : DKI Jakarta

Blok II. Penanggung Jawab Survei (sebagai *Contact Person*)

2.1. Nama Penanggung Jawab di Instansi

Tuliskan nama, jabatan, nomor telepon, nomor fax dan alamat email penanggung jawab survei di instansi penyelenggara survei. Penanggung jawab instansi disini sebaiknya yang mengetahui tentang informasi umum mengenai survei. Informasi umum adalah keterangan mengenai latar belakang, tujuan, cakupan dan lain-lainnya tentang survei ini.

2.2. Nama Manajer Survei

Tuliskan nama, jabatan, alamat surat, nomor telepon, nomor fax, dan alamat email manajer survei yang mengetahui teknis penyelenggaraan survei ini.

Blok III. Informasi Umum

3.1. Survei ini dilakukan

Lingkari kode 1 jika survei dilakukan hanya sekali dan lingkari kode 2 jika survei ini dilakukan berulang kali.

3.2. Jika “Berulang” frekuensi penyelenggaraan Rincian 3.1. (selanjutnya akan ditulis R.3.1.) berkode 2

Lingkari kode yang sesuai dengan frekuensi dilakukannya survei ini.

3.3. Tipe pengumpulan data

Lingkari kode 1 jika tipe pengumpulan data pada survei ini *longitudinal*, kode 2 jika *cross sectional*, dan kode 3 jika gabungan *longitudinal* dan *cross sectional*.

1. *Longitudinal*, yaitu data dikumpulkan pada waktu yang berbeda (dari waktu ke waktu) dan dilakukan secara terus menerus untuk melihat perubahan yang terjadi, biasanya ada analisis secara deskriptif.

- *Trend studies*: (1) dilakukan secara berkala; (2) setiap sampel mewakili populasi untuk waktu yang berbeda; (3) populasi sama, anggota mungkin berubah; (4) ada kemungkinan mengkaitkan antar variabel, tetapi tidak rinci.

- *Cohort studies*: (1) fokusnya adalah spesifik populasi; (2) dilakukan secara berkala; (3) populasi keadaan awal dan diikuti.

- *Parallel studies*: (1) dilakukan secara berkala; (2) sampel sama dan diikuti secara terus menerus; (3) analisa populasi tidak dimungkinkan dan rumit; (4) mahal dan membutuhkan waktu.

2. *Cross Sectional*, yaitu data dikumpulkan pada saat tertentu dari sampel terpilih dan menggambarkan suatu parameter pada saat itu (suatu saat) juga digunakan untuk mengaitkan suatu peubah dengan peubah lainnya (kajian mengaitkan antar variabel).

I. Identifikasi Penyelenggara Survei

1.1. Instansi Pemerintah Penyelenggara :

1.2. Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara :

Kabupaten/Kota :
(Coret salah satu)

Provinsi :

II. Penanggung Jawab Survei (Sebagai Contact Person)

2.1. Nama Penanggung Jawab di Instansi :

Jabatan :

Telepon : Fax :

E-mail :

2.2. Nama Manajer Survei :

Jabatan :

Alamat :

Telepon : Fax :

E-mail :

III. Informasi Umum

3.1. Survei ini dilakukan :

Hanya sekali - 1 ----> *langsung ke R.3.3.* *Berulang* - 2

3.2. Jika "Berulang" frekuensi penyelenggaraan (R.3.1. berkode 2)

Harian - 1 *Empat Bulanan* - 5

Mingguan - 2 *Semesteran* - 6

Bulanan - 3 *Tahunan* - 7

Triwulanan - 4 *> Dua Tahunan* - 8

Lainnya (sebutkan) - 9

3.3. Tipe pengumpulan data :

Longitudinal - 1

Cross Sectional - 2

Longitudinal dan Cross Sectional - 3

Blok IV. Tujuan Survei dan Peubah yang Dikumpulkan

4.1. Tujuan survei

Tuliskan tujuan diselenggarakannya survei ini secara ringkas dan jelas pada tempat yang telah disediakan.

4.2. Peubah (*variable*) yang dikumpulkan pada survei ini dan periode enumerasi (referensi waktu)

Tuliskan peubah yang akan dikumpulkan dan periode enumerasi (referensi waktu) yang digunakan dalam survei ini. Contoh :

Besarnya biaya untuk pekerja, pembelian bahan baku, bahan penolong sewa tempat, dan lain-lain pada perusahaan industri elektronika, dengan periode enumerasi adalah setahun yang lalu.

Blok V. Rancangan Pengumpulan Data

5.1. Cara pengumpulan data

Tuliskan cara pengumpulan data yang akan dilakukan. Lingkari kode 1 jika pengumpulan data hanya pada sebagian populasi (sampel) dan lingkari kode 2 jika pengumpulan data pada seluruh populasi.

5.2. Survei dilakukan di

Tuliskan wilayah atau daerah dimana survei ini akan dilakukan. Lingkari kode 1 jika survei akan dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dan lingkari kode 2 jika survei akan dilakukan di sebagian wilayah Indonesia.

Pengertian di seluruh wilayah Indonesia adalah bila survei tersebut dilakukan di semua provinsi dan mencakup semua kabupaten/kota yang ada di Indonesia, tetapi tidak harus mencakup seluruh kecamatan atau desa/kelurahan yang ada. Bila ada responden atau unit wilayah di satu kabupaten/kota yang terambil dalam suatu survei, maka kabupaten/kota tersebut sudah diartikan tercakup dalam survei yang dimaksud. Sehingga bila di semua kabupaten/kota ada sebagian wilayahnya yang terambil survei yang akan dilakukan, sudah diartikan mencakup seluruh wilayah Indonesia.

5.3. Bila di sebagian wilayah Indonesia, survei dilakukan di

Tuliskan nama provinsi dan nama kabupaten/kota yang akan dicakup bila survei akan dilakukan di sebagian wilayah Indonesia (tidak mencakup semua propinsi atau tidak mencakup semua kabupaten/kota yang ada di Indonesia). Bila dalam satu provinsi semua kabupaten/kota tercakup dalam survei yang akan dilakukan, tidak perlu ditulis nama-nama kabupaten/kota yang ada tetapi cukup ditulis "semua". Jika ruang yang tersedia tidak mencukupi gunakan kertas tambahan.

IV. Tujuan Survei dan Peubah yang Dikumpulkan

4.1. Tujuan Survei :

4.2. Peubah (*variable*) yang dikumpulkan pada survei ini dan periode enumerasi (*referensi waktu*)

V. Rancangan Pengumpulan Data

5.1. Cara pengumpulan data :

Sebagian populasi (sampel)

- 1

Seluruh populasi

- 2

5.2. Survei dilakukan di :

Seluruh wilayah Indonesia

- 1 -----> langsung ke R. 5.4.

Sebagian wilayah Indonesia

- 2

5.3. Bila di sebagian wilayah Indonesia, survei dilakukan di :

No.

Provinsi

Kabupaten/Kota

- 5.4. Metode pengumpulan data
Tentukan metode pengumpulan data yang dilakukan pada survei ini. Lingkari kode yang sesuai (bisa lebih dari satu). Jika isian lebih dari satu, jumlahkan kode yang terpilih dan pindahkan ke kotak yang tersedia.
- 5.5. Metode penelitian
Tentukan metode penelitian pada survei ini apakah sampel probabilitas atau sampel non probabilitas.
Sampel probabilitas adalah teknik sampling yang menerapkan setiap unit dalam populasi memiliki kesempatan atau peluang (lebih dari nol) untuk terpilih dalam sampel, dan peluang ini dapat ditentukan secara akurat. Teknik sampling yang termasuk dalam Probability Sampling adalah *Simple Random Sampling (SRS)*, *Systematic Sampling*, dan *Probability Proportional To Size (PPS)*.
Sampel non probabilitas adalah teknik sampling dimana sampel dipilih dari populasi tanpa menggunakan sampling probabilitas, dengan kata lain peluang unit dalam populasi untuk terpilih sebagai sampel tidak dapat dihitung. Unit populasi yang terpilih menjadi sampel bisa disebabkan karena kebetulan atau karena faktor lain yang sebelumnya sudah direncanakan oleh peneliti.
- 5.6. Metode untuk Sampel Non Probabilitas (bila R.5.5. berkode 2)
Jika P.5.5 kode yang dilingkari adalah kode 2 (sampel Non Probabilitas) jelaskan metode yang digunakan dan komposisi sampelnya.
Teknik sampel non probabilitas meliputi:
1. *Quota Sampling* (Sampling kuota); teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan, jumlah subjek yang akan diselidiki ditetapkan terlebih dahulu.
 2. *Accidental Sampling* (Sampling aksidental); teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, sangat subyektif, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.
 3. *Purposive Sampling*; teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, dengan catatan bahwa sampel tersebut mewakili populasi. Dalam purposive pemilihan sekelompok subyek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Misalnya akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai, maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam bidang kepegawaian saja.
 4. *Saturation Sampling* (Sampling jenuh); teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang.
 5. *Snowball sampling*; teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak. Ibarat bola salju yang menggelinding, makin lama semakin besar.
- 5.7. Apakah melakukan Uji Coba (*Pilot Study*)
Lingkari kode 1 jika pada survei ini dilakukan pilot studi dan lingkari kode 2 jika tidak dilakukan uji coba. Jika kode 1, jelaskan secara singkat pelaksanaan uji coba tersebut, seperti jumlah responden, tempat pelaksanaan uji coba, frekuensi uji coba, dan lain-lain.
- 5.8. Petugas pengumpul data
Sebutkan petugas pengumpul data survei ini. Lingkari kode yang sesuai (bisa lebih dari satu).
- 5.9. Persyaratan pendidikan terendah petugas pengumpul data
Sebutkan persyaratan pendidikan terendah seluruh petugas pengumpul data survei ini, baik staf sendiri, mitra/kontrak, maupun lainnya. Jika Akademi/Universitas maka sebutkan apakah Diploma/S1/S2/S3. Lingkari kode yang sesuai (bisa lebih dari satu).
- 5.10. Apakah melakukan pelatihan petugas
Lingkari kode 1 jika petugas pelaksana survei ini mengikuti pelatihan terlebih dahulu atau lingkari kode 2 jika tidak. Jika “ya”, jelaskan secara ringkas tentang kegiatan pelatihan petugas tersebut. Misal antara lain berapa lama waktu pelatihan dan materi pokok pelatihan. Briefing merupakan salah satu cara pelatihan petugas.
- 5.11. Jumlah petugas
Isikan jumlah petugas pelaksana survei ini sesuai dengan tugasnya, yaitu supervisi/penyelia dan petugas pengumpul data.

5.4. Metode pengumpulan data :			
<i>Wawancara langsung</i>	- 1		
<i>Wawancara melalui sarana komunikasi</i>	- 2		
<i>Mengisi kuesioner sendiri (swacacah)</i>	- 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Pengamatan (observasi)</i>	- 8		
<i>Lainnya (sebutkan)</i>	- 16		
5.5. Metode penelitian :			
<i>Sampel Probabilitas</i>	- 1	-----> langsung ke R.5.7	<input type="checkbox"/>
<i>Sampel Non Probabilitas</i>	- 2		
5.6. Metode untuk <i>Sampel Non Probabilitas</i> (bila R.5.5. berkode 2) :			
5.7. Apakah melakukan Uji Coba (<i>Pilot Study</i>) :			
Ya	- 1	Tidak	- 2
Jika "Ya", jelaskan :			<input type="checkbox"/>
5.8. Petugas pengumpul data :			
<i>Staf sendiri</i>	- 1		
<i>Mitra/Tenaga Kontrak</i>	- 2		<input type="checkbox"/>
<i>Lainnya (sebutkan)</i>	- 4		
5.9. Persyaratan pendidikan terendah petugas pengumpul data :			
<i>SMP</i>	- 1		
<i>SMU/SMK</i>	- 2		<input type="checkbox"/>
<i>Akademi/Universitas</i>	- 4		
5.10. Apakah melakukan pelatihan petugas :			
Ya	- 1	Tidak	- 2
Jika "Ya", jelaskan :			<input type="checkbox"/>
5.11. Jumlah petugas :			
<i>Supervisi/Penyelia/Pengawas</i>		<i>Orang</i>	
<i>Pengumpul Data/Enumerator</i>		<i>Orang</i>	

Blok VI. Rancangan Sampel (diisi bila R.5.1. berkode 1 dan R.5.5. berkode 1)

6.1. Jenis rancangan sampel

Tuliskan secara ringkas jenis rancangan sampel yang digunakan pada survei ini. Lingkari kode 1 jika rancangan sampel adalah *single stage/phase*, dan kode 2 jika rancangan sampel *multi stage/phase* atau rancangan sampel lebih dari satu tahap dan jelaskan.

Single stage adalah penarikan sampel langsung pada unit-unit yang terdaftar pada kerangka sampel (penarikan sampel hanya satu kali).

Multi stage adalah metode pengambilan sampel melalui dua tahap atau lebih dimana metode tiap tahapnya bisa berbeda.

Misal: Tahap I: Populasi pertama terdiri dari seluruh kecamatan yang dipilih secara PPS dari seluruh kabupaten yang ada.

Tahap II: Dari kecamatan terpilih diambil beberapa kelurahan/desa secara PPS.

Tahap III: Dari desa terpilih dibuat daftar seluruh unit sampel yang akan digunakan.

6.2. Kerangka sampel

Tulis dan jelaskan secara rinci kerangka sampel yang digunakan. Jika rancangan sampel lebih dari satu tahap, tuliskan kerangka sampel untuk setiap tahap.

Yang dimaksud dengan kerangka sampel adalah daftar dari semua unsur sampel dalam populasi sampel, berisi seluruh unit dalam populasi yang akan dijadikan dasar penarikan sampel (dibentuk dari kerangka induk). Kerangka sampel dapat berupa daftar mengenai jumlah penduduk, jumlah bangunan, mungkin pula sebuah peta yang unit-unitnya tergambar secara jelas.

Sebaiknya kerangka sampel memenuhi syarat, sebagai berikut :

- Meliputi seluruh unsur sampel, tersedia sampai satuan unit terkecil sebagai dasar penarikan sampel
- Unsur sampel tidak dihitung dua kali, tidak tumpang tindih atau terlewat
- *Up to date*
- Mempunyai batas jelas
- Mempunyai korelasi dengan data yang diteliti
- Dapat dilacak di lapangan

Contoh :

Untuk satu tahap : *Direktori Perusahaan Industri Besar dan Sedang di Tahun 1998.*

Untuk dua tahap : *Tahap I. DaftarBlok Sensus di DKI Jakarta 1999*

Tahap II. Daftar Rumah Tangga pada tiap Blok Sensus di DKI Jakarta.

6.3. Metode pemilihan sampel

Tuliskan secara ringkas metode pemilihan sampel yang digunakan pada survei ini, misalnya *simple random sampling*, *systematic sampling*, *probability proportional to size*. Jika survei ini menggunakan rancangan sampling multi stage/phase, jelaskan pemilihan sampel pada tiap stage/phase.

- *Simple random sampling*; merupakan pemilihan sampel berpeluang yang setiap elemen dalam populasi memiliki peluang terpilih yang sama..
- *Systematic sampling*; metode pengambilan sampel secara sistematis dengan interval tertentu dari suatu kerangka sampel yang telah diurutkan.
- *Probability Proportional To Size*; merupakan teknik sampling yang menggunakan variabel tambahan yang dipercaya berkorelasi kuat dengan variabel yang sedang diteliti untuk meningkatkan akurasi pemilihan sampel

6.4. Keseluruhan fraksi sampel (*overall sampling fraction*)

Tuliskan fraksi sampel (n/N) secara keseluruhan. Jika rancangan sampel multi stage/phase, fraksi sampel yang ditulis adalah untuk seluruh tahap.

6.5. Unit sampel

Tuliskan unit sampel terkecil dan tuliskan jumlah seluruh sampel survei ini.

Unit sampel adalah unit yang dijadikan dasar penarikan sampel baik berupa elemen atau kumpulan elemen (klaster). Sebagai contoh rumah tangga dapat dijadikan unit sampel dan atau kumpulan rumah tangga pada wilayah tertentu yaitu blok sensus. Contoh lain dari unit sampel adalah daftar individu perusahaan/usaha.

6.6. Perkiraan *sampling error*

Tuliskan perkiraan *sampling error* pada survei ini.

Sampling error adalah penyimpangan yang terjadi karena adanya kesalahan dalam pemakaian sampel. Semakin besar sampel yang diambil maka semakin kecil terjadinya penyimpangan.

6.7. Responden

Tuliskan responden dan jumlah responden survei ini. Isian rincian ini bisa sama dengan rincian 6.5.

Contoh : Responden survei adalah perorang/individu pada rumah tangga terpilih sampel

VI. Rancangan Sampel (diisi bila R.5.1. berkode 1 dan R.5.5. berkode 1)

6.1. Jenis Rancangan Sampel :

Single Stage/Phase

- 1

Multi Stage/Phase (sebutkan)

- 2

6.2. Kerangka sampel :

6.3. Metode pemilihan sampel :

6.4. Keseluruhan fraksi sampel (*overall sampling fraction*):

6.5. Unit sampel :

6.6. Perkiraan *sampling error* :

6.7. Responden :

Blok VII. Pengolahan Data, Estimasi, dan Analisis

7.1. Metode pengolahan

Prosedur dan metode pengolahan data yang dilakukan untuk mengolah data hasil survei ini, antara lain meliputi penyuntingan (*editing*), penyandian (*coding*), dan penyahihan (*validasi*). Lingkari kode 1 jika “Ya” dan kode 2 jika “Tidak”. Adapun yang dimaksud dengan:

- Penyuntingan adalah melakukan pengecekan terhadap kemungkinan kesalahan pengisian daftar pertanyaan dan ketidakserasian informasi (*inconsistency*).
- Penyandian adalah kegiatan pemberian kode-kode tertentu untuk mempermudah pengolahan, terutama jika akan diolah dengan media komputer.
- Penyahihan adalah proses pemeriksaan terhadap data dan proses perbaikan data yang salah menjadi data yang benar dan valid. Tingkat validitas data sangat berpengaruh terhadap kualitas keluaran (*output*) yang dihasilkan. Proses penyahihan ada dua cara yakni penyahihan manual dan penyahihan komputer.

7.2. Tingkat estimasi yang diharapkan

Lingkari kode tingkat estimasi yang diharapkan, kode yang dilingkari bisa lebih dari satu.

7.3. Metode analisis hasil survei

Tuliskan secara ringkas metode analisis yang akan digunakan pada survei ini. Misal analisis deskriptif, analisis inferensia seperti regresi, regresi logistik, ataupun gabungan antara analisis deskriptif dan analisis inferensial.

7.4. Produk data yang tersedia untuk umum

Sebutkan produk data dari survei ini yang didiseminasikan/disebarluaskan kepada umum. Lingkari kode 1 jika “Ya” tersedia dan 2 jika “Tidak” tersedia.

Keterangan:

- Publikasi dalam *hardcopy* adalah hasil survei yang dipublikasikan dalam bentuk buku.
- Publikasi dalam *softcopy* adalah hasil survei yang dipublikasikan dalam media komputer (*disket, compact disk, optical disk*).
- Macro data adalah hasil survei yang tersedia bagi umum dalam bentuk file-file summary (agregat).
- Micro data/raw data adalah hasil survei yang tersedia bagi umum dalam bentuk *individual record*.

7.5. Waktu pelaksanaan survei (lampirkan)

Tuliskan tanggal, bulan dan tahun perencanaan, pelaksanaan lapangan, pengolahan, penyajian, dan analisis survei ini.

7.6. Waktu ketersediaan hasil survei untuk umum

Tuliskan tanggal, bulan dan tahun ketersediaan hasil survei ini untuk umum.

Pengertian “ketersediaan” disini adalah bahwa hasil survei ini menjadi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum (*publicly available*).

VII. Pengolahan Data, Estimasi, dan Analisis

7.1. Metode pengolahan :

<i>Penyuntingan (Editing)</i>	Ya - 1	<i>Tidak</i> - 2	<input type="checkbox"/>
<i>Penyandian (Coding)</i>	Ya - 1	<i>Tidak</i> - 2	<input type="checkbox"/>
<i>Penyahihan (Validasi)</i>	Ya - 1	<i>Tidak</i> - 2	<input type="checkbox"/>

7.2. Tingkat estimasi yang diharapkan :

<i>Nasional</i>	- 1	<i>Kecamatan</i>	- 8	<input type="checkbox"/>
<i>Provinsi</i>	- 2	<i>Lainnya</i>	- 16	
<i>Kabupaten/Kota</i>	- 4	<i>Tidak dilakukan estimasi</i>	- 32	

7.3. Metode analisis hasil survei :

7.4. Produk data yang tersedia untuk umum :

<i>Publikasi dalam Media Cetak</i>	Ya - 1	<i>Tidak</i> - 2	<input type="checkbox"/>
<i>Publikasi dalam Media Elektronik</i>	Ya - 1	<i>Tidak</i> - 2	<input type="checkbox"/>
<i>Macro Data</i>	Ya - 1	<i>Tidak</i> - 2	<input type="checkbox"/>
<i>Micro Data/Raw Data</i>	Ya - 1	<i>Tidak</i> - 2	<input type="checkbox"/>
<i>Lainnya (sebutkan)</i>	Ya - 1	<i>Tidak</i> - 2	<input type="checkbox"/>

7.5. Waktu pelaksanaan survei (lampirkan) :

	Tgl	Bln	Thn		Tgl	Bln	Thn
<i>Perencanaan/Persiapan</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	s.d.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<i>Pelaksanaan Lapang</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	s.d.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<i>Pengolahan</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	s.d.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<i>Analisis</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	s.d.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<i>Penyajian</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	s.d.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

7.6. Waktu ketersediaan hasil survei untuk umum :

Tgl	Bln	Thn
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**SEKTOR
PEMERINTAHAN**

**DAFTAR DATA STATISTIK SEKTORAL YANG DIHASILKAN OLEH PRODUSEN DATA
SEKRETARIAT DEWAN**

No	Elemen Data
1	Jumlah Komisi Dewan di Kabupaten Cirebon
2	Jumlah Anggota Per Komisi Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon
3	Jumlah Partai di Kabupaten Cirebon
6	Jumlah Kursi Berdasarkan Partai Politik di Kabupaten Cirebon
7	Jumlah Fraksi di Kabupaten Cirebon
8	Komposisi Dewan berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Cirebon
9	Komposisi Dewan Berdasarkan Umur di Kabupaten Cirebon

Keterangan:

- Bappelitbangda menentukan data prioritas dan non prioritas
- Cara pengumpulan data: (1) Sensus; (2) Survei; (3) Kompilasi Produk Administrasi; dan (4) Cara Lain Sesuai Perkem

**DAFTAR DATA/INFORMASI GEOSPASIAL YANG DIHASILKAN OLEH PRODUSEN DATA
SEKRETARIAT DEWAN**

No	Data/Informasi Geospasial
1	Kantor DPRD Kabupaten Cirebon
2	DPC PKB Kabupaten Cirebon Jalan Fatahillah No. 33 Kel. Watubelah Kec. Sumber
3	DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon Jln. Pangeran Cakrabuana Desa Cempaka Kec. Talun
4	DPC Partai Golkar Kabupaten Cirebon Jalan Fatahillah Kel. Watubelah Kec. Sumber
5	DPC Partai Gerindra Kabupaten Cirebon Jln. Pangeran Cakrabuana Desa Kepongpongan Kec. Talun
6	DPC Partai Nasdem Kabupaten Cirebon Jln. Pangeran Cakrabuana No. 15 Desa Kecomberan Kec. Talun
7	DPC Partai Demokrat Kabupaten Cirebon Jln. Dewi Sartika Kelurahan Kenanga Kec. Sumber
8	DPD PKS Kabupaten Cirebon Jln. Pangeran Kejaksan Kelurahan Sumber Kec. Sumber

**SEKTOR
PEMERINTAHAN**

**DAFTAR DATA STATISTIK SEKTORAL YANG DIHASILKAN OLEH PRODUSEN DATA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIREBON**

No	Elemen Data
1	Jumlah Pejabat Pengadaan Berdasarkan Perangkat Daerah di Kabupaten Cirebon
2	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Memiliki Sertifikat Barang Jasa Berdasarkan Perangkat Daerah di Kabupaten Cirebon
3	Jumlah Produk Hukum/Informasi Hukum yang Dipublikasikan pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pemerintah Kabupaten Cirebon
4	Jumlah Tindakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Cirebon
5	Jumlah Peraturan Daerah yang Sudah Ditetapkan Berdasarkan Tahun di Kabupaten Cirebon
6	Jumlah Peraturan Bupati yang Sudah Ditetapkan Berdasarkan Tahun di Kabupaten Cirebon
7	Jumlah Keputusan Bupati yang Sudah Ditetapkan Berdasarkan Tahun di Kabupaten Cirebon
8	Jumlah Kerjasama Daerah di Pemerintah Kabupaten Cirebon
9	Jumlah Pondok Pesantren Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
10	Jumlah Santri dan Ustadz Pondok Pesantren Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
11	Daftar Unit Eselon Berdasarkan Perangkat Daerah di Kabupaten Cirebon
12	Jumlah Perkara yang Ditangani Secara Litigasi Berdasarkan Jenis Perkara di Kabupaten Cirebon
13	Jumlah Paket Pengadaan Barang Jasa yang Dilelangkan Berdasarkan Mekanisme Pengadaan di Kabupaten Cirebon

Keterangan:

- Bappelitbangda menentukan data prioritas dan non prioritas
- Cara pengumpulan data: (1) Sensus; (2) Survei; (3) Kompilasi Produk Administrasi; dan (4) Cara Lain Sesuai Perkembangan Teknologi

**DAFTAR DATA/INFORMASI GEOSPASIAL YANG DIHASILKAN OLEH PRODUSEN DATA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIREBON**

No	Data/Informasi Geospasial
1	Sebaran Pondok Pesantren
2	
3	
4	
5	

**SEKTOR
PEMERINTAHAN**

**DAFTAR DATA STATISTIK SEKTORAL YANG DIHASILKAN OLEH PRODUSEN DATA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN CIREBON**

No	Elemen Data
1	Data Hasil Survei Penilaian Integritas Pemerintah Daerah di Kabupaten Cirebon
2	Data Jumlah dan Jenis pelayanan Inspektorat di Kabupaten Cirebon
3	Data Indeks Monitoring Centre For Prevention (MCP) di Kabupaten Cirebon
4	Data Laporan Hasil Pemeriksaan (RAHASIA) di Kabupaten Cirebon
5	Data Survei Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Cirebon
6	Data Unit Pengelolaan Gratifikasi (RAHASIA) di Kabupaten Cirebon
7	Data Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Cirebon
8	Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (RAHASIA) di Kabupaten Cirebon
9	Data Pengaduan Masyarakat Umum (RAHASIA) di Kabupaten Cirebon
10	Data Whistleblowing system (RAHASIA) di Kabupaten Cirebon
11	Data Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Cirebon
12	Data Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Kabupaten Cirebon
13	Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Perangkat Daerah di Kabupaten Cirebon
14	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Berdasarkan Interpretasi di Kabupaten Cirebon
15	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Berdasarkan Tahun di Kabupaten Cirebon
16	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Berdasarkan Atribut Penilaian di Kabupaten Cirebon
17	Data Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) di Kabupaten Cirebon
18	Data Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Kabupaten Cirebon
19	Data Jumlah Obyek Pengawasan/Pemeriksaan di Kabupaten Cirebon
20	Data Jumlah Kerugian Negara / Daerah (RAHASIA) di Kabupaten Cirebon
21	Data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Kabupaten Cirebon
22	Data Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Kabupaten Cirebon
23	Data Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Cirebon
24	Data Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (PK APIP) di Kabupaten Cirebon
25	Data Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Inspektorat di Kabupaten Cirebon
26	Data Kepegawaian Inspektorat di Kabupaten Cirebon
27	Data Regulasi dan Standarisasi di Kabupaten Cirebon
28	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Cirebon

Keterangan:

- Bappelitbangda menentukan data prioritas dan non prioritas
- Cara pengumpulan data: (1) Sensus; (2) Survei; (3) Kompilasi Produk Administrasi; dan (4) Cara Lain Sesuai Perkembangan Teknologi

**DAFTAR DATA/INFORMASI GEOSPASIAL YANG DIHASILKAN OLEH PRODUSEN DATA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN CIREBON**

No	Data/Informasi Geospasial
1	Lokasi Kantor Inspektorat
2	Lokasi Obyek Pemeriksaan

**SEKTOR
PENDIDIKAN**

DAFTAR DATA YANG DIHASILKAN OLEH PRODUSEN DATA

No	Elemen Data
4.1.	Jumlah Sekolah Taman Kanak-kanak (TK) Berdasarkan Status Sekolah Menurut Kecamatan
4.2.	Jumlah Sekolah Raudlatul Atfal (RA)/Bustanul Atfal (BA) Berdasarkan Status Sekolah Menurut Kecamatan
4.3.	Jumlah Sekolah Dasar (SD) Berdasarkan Status Sekolah Menurut Kecamatan
4.4.	Jumlah Sekolah Dasar (SD) Berdasarkan Status Sekolah dan Standar Menurut Kecamatan
4.5.	Jumlah Sekolah Dasar (SD) Berdasarkan Akreditasi Menurut Kecamatan
4.6.	Jumlah Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Berdasarkan Status Sekolah Menurut Kecamatan
4.7.	Jumlah Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Berdasarkan Status Sekolah dan Standar Menurut Kecamatan
4.8.	Jumlah Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Berdasarkan Akreditasi Menurut Kecamatan
4.9.	Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Berdasarkan Status Sekolah Menurut Kecamatan
4.10.	Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Berdasarkan Status Sekolah dan Standar Menurut Kecamatan
4.11.	Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Berdasarkan Akreditasi Menurut Kecamatan
4.12.	Jumlah Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTS) Berdasarkan Status Sekolah Menurut Kecamatan
4.13.	Jumlah Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTS) Berdasarkan Status Sekolah dan Standar Menurut Kecamatan
4.14.	Jumlah Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTS) Berdasarkan Akreditasi Menurut Kecamatan
4.15.	Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Berdasarkan Status Sekolah Menurut Kecamatan
4.16.	Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Berdasarkan Status Sekolah dan Standar Menurut Kecamatan
4.17.	Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Berdasarkan Akreditasi Menurut Kecamatan
4.18.	Jumlah Sekolah Madrasah Aliyah (MA) Berdasarkan Status Sekolah Menurut Kecamatan
4.19.	Jumlah Sekolah Madrasah Aliyah (MA) Berdasarkan Status Sekolah dan Standar Menurut Kecamatan
4.20.	Jumlah Sekolah Madrasah Aliyah (MA) Berdasarkan Akreditasi Menurut Kecamatan
4.21.	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Berdasarkan Status Sekolah Menurut Kecamatan
4.22.	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Berdasarkan Status Sekolah dan Standar Menurut Kecamatan
4.23.	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Berdasarkan Akreditasi Menurut Kecamatan
4.24.	Jumlah Siswa Taman Kanak-kanak (TK) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Menurut Kecamatan
4.25.	Jumlah Siswa Taman Kanak-kanak (TK) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Status Sekolah Menurut Kecamatan
4.26.	Jumlah Siswa Raudlatul Atfal (RA)/Bustanul Atfal (BA) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Menurut Kecamatan
4.27.	Jumlah Siswa Raudlatul Atfal (RA)/Bustanul Atfal (BA) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Status Sekolah Menurut Kecamatan
4.28.	Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Status Sekolah Menurut Kecamatan
4.29.	Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia Sekolah Menurut Kecamatan
4.30.	Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Putus Sekolah Menurut Kecamatan
4.31.	Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Status Sekolah Menurut Kecamatan
4.32.	Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia Sekolah Menurut Kecamatan
4.33.	Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Putus Sekolah Menurut Kecamatan
4.34.	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Status Sekolah Menurut Kecamatan
4.35.	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia Sekolah Menurut Kecamatan
4.36.	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Putus Sekolah Menurut Kecamatan
4.37.	Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTS) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Status Sekolah Menurut Kecamatan
4.38.	Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTS) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia Sekolah Menurut Kecamatan
4.39.	Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTS) Putus Sekolah Menurut Kecamatan
4.40.	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Status Sekolah Menurut Kecamatan
4.41.	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia Sekolah Menurut Kecamatan
4.42.	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Putus Sekolah Menurut Kecamatan
4.43.	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Tingkat II Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jurusan Menurut Kecamatan
4.44.	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Tingkat III Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jurusan Menurut Kecamatan
4.45.	Jumlah Siswa Sekolah Madrasah Aliyah (MA) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Status Sekolah Menurut Kecamatan
4.46.	Jumlah Siswa Sekolah Madrasah Aliyah (MA) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia Sekolah Menurut Kecamatan
4.47.	Jumlah Siswa Sekolah Madrasah Aliyah (MA) Putus Sekolah Menurut Kecamatan
4.48.	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Status Sekolah Menurut Kecamatan
4.49.	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia Sekolah Menurut Kecamatan
4.50.	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Putus Sekolah Menurut Kecamatan
4.51.	Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Menurut Kecamatan
4.52.	Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) Berdasarkan Status Kepegawaian Menurut Kecamatan
4.53.	Jumlah Guru Raudlatul Atfal (RA)/Bustanul Atfal (BA) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Menurut Kecamatan
4.54.	Jumlah Guru Raudlatul Atfal (RA)/Bustanul Atfal (BA) Berdasarkan Status Kepegawaian Menurut Kecamatan
4.55.	Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Menurut Kecamatan
4.56.	Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Berdasarkan Status Kepegawaian Menurut Kecamatan
4.57.	Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pelatihan Mata Pelajaran yang Diikuti Menurut Kecamatan
4.58.	Jumlah Guru dan Kepala Sekolah Dasar (SD) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Sertifikasi Menurut Kecamatan
4.59.	Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Menurut Kecamatan
4.60.	Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Berdasarkan Status Kepegawaian Menurut Kecamatan
4.61.	Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pelatihan Mata Pelajaran yang Diikuti Menurut Kecamatan
4.62.	Jumlah Guru dan Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Sertifikasi Menurut Kecamatan
4.63.	Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Menurut Kecamatan
4.64.	Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Berdasarkan Status Kepegawaian Menurut Kecamatan

No	Elemen Data
4.65.	Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pelatihan Mata Pelajaran yang Diikuti Menurut Kecamatan
4.66.	Jumlah Guru dan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Sertifikasi Menurut Kecamatan
4.67.	Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Latar Belakang Program Studi Menurut Kecamatan
4.68.	Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Bidang Studi yang Diajarkan Menurut Kecamatan
4.69.	Jumlah Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan
4.70.	Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTS) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Menurut Kecamatan
4.71.	Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTS) Berdasarkan Status Kepegawaian Menurut Kecamatan
4.72.	Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTS) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pelatihan Mata Pelajaran yang Diikuti Menurut Kecamatan
4.73.	Jumlah Guru dan Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTS) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Sertifikasi Menurut Kecamatan
4.74.	Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTS) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Latar Belakang Program Studi Menurut Kecamatan
4.75.	Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTS) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Bidang Studi yang Diajarkan Menurut Kecamatan
4.76.	Jumlah Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTS) Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan
4.77.	Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi Menurut Kecamatan
4.78.	Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Berdasarkan Status Kepegawaian Menurut Kecamatan
4.79.	Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pelatihan Mata Pelajaran yang Diikuti Menurut Kecamatan
4.80.	Jumlah Guru dan Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Sertifikasi Menurut Kecamatan
4.81.	Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Latar Belakang Program Studi Menurut Kecamatan
4.82.	Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Bidang Studi yang Diajarkan Menurut Kecamatan
4.83.	Jumlah Rombongan Belajar Taman Kanak-kanak (TK) Menurut Kecamatan
4.84.	Jumlah Rombongan Belajar Raudlatul Atfal (RA)/Bustanul Atfal (BA) Menurut Kecamatan
4.85.	Jumlah Rombongan Belajar Sekolah Dasar (SD) Menurut Kecamatan
4.86.	Jumlah Rombongan Belajar Madrasah Ibtidaiyah (MI) Menurut Kecamatan
4.87.	Jumlah Rombongan Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Kecamatan
4.88.	Jumlah Rombongan Belajar Madrasah Tsanawiyah (MTS) Menurut Kecamatan
4.89.	Jumlah Rombongan Belajar Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Kecamatan
4.90.	Jumlah Ruang Kelas Taman Kanak-kanak (TK) Berdasarkan Kepemilikan Menurut Kecamatan
4.91.	Jumlah Ruang Kelas Taman Kanak-kanak (TK) Berdasarkan Kondisi Ruangan Menurut Kecamatan
4.92.	Jumlah Ruang Kelas Raudlatul Atfal (RA)/Bustanul Atfal (BA) Berdasarkan Kepemilikan Menurut Kecamatan
4.93.	Jumlah Ruang Kelas Raudlatul Atfal (RA)/Bustanul Atfal (BA) Berdasarkan Kondisi Ruangan Menurut Kecamatan
4.94.	Jumlah Ruang Kelas Sekolah Dasar (SD) Berdasarkan Kepemilikan Menurut Kecamatan
4.95.	Jumlah Ruang Kelas Sekolah Dasar (SD) Berdasarkan Kondisi Ruangan Menurut Kecamatan
4.96.	Jumlah Ruang Kelas Madrasah Ibtidaiyah (MI) Berdasarkan Kepemilikan Menurut Kecamatan
4.97.	Jumlah Ruang Kelas Madrasah Ibtidaiyah (MI) Berdasarkan Kondisi Ruangan Menurut Kecamatan
4.98.	Jumlah Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama (SMP) Berdasarkan Kepemilikan Menurut Kecamatan
4.99.	Jumlah Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama (SMP) Berdasarkan Kondisi Ruangan Menurut Kecamatan
4.100.	Jumlah Ruang Kelas Madrasah Tsanawiyah (MTS) Berdasarkan Kepemilikan Menurut Kecamatan
4.101.	Jumlah Ruang Kelas Madrasah Tsanawiyah (MTS) Berdasarkan Kondisi Ruangan Menurut Kecamatan
4.102.	Jumlah Ruang Kelas Sekolah Menengah Atas (SMA) Berdasarkan Kepemilikan Menurut Kecamatan
4.103.	Jumlah Ruang Kelas Sekolah Menengah Atas (SMA) Berdasarkan Kondisi Ruangan Menurut Kecamatan
4.104.	Jumlah Fasilitas Sekolah Taman Kanak-kanak (TK) Menurut Kecamatan
4.105.	Jumlah Fasilitas Sekolah Raudlatul Atfal (RA)/Bustanul Atfal (BA) Menurut Kecamatan
4.106.	Jumlah Fasilitas Sekolah Dasar (SD) Menurut Kecamatan
4.107.	Jumlah Fasilitas Madrasah Ibtidaiyah (MI) Menurut Kecamatan
4.108.	Jumlah Fasilitas Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Kecamatan
4.109.	Jumlah Fasilitas Madrasah Tsanawiyah (MTS) Menurut Kecamatan
4.110.	Jumlah Fasilitas Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Kecamatan
4.111.	Rata-rata UASBN Sekolah Dasar (SD) Menurut Kecamatan
4.112.	Rata-rata UASBN Madrasah Ibtidaiyah (MI) Menurut Kecamatan
4.113.	Rata-rata UN Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Kecamatan
4.114.	Rata-rata UN Madrasah Tsanawiyah (MTS) Menurut Kecamatan
4.115.	Rata-rata UN Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Kecamatan
4.116.	Jumlah Perguruan Tinggi di Bawah Kementerian Agama Kabupaten Cirebon
4.117.	Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi di Bawah Kementerian Agama Kabupaten Cirebon
4.118.	Jumlah Tenaga Edukatif Perguruan Tinggi di Bawah Kementerian Agama Kabupaten Cirebon
4.119.	Jumlah Perguruan Tinggi di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
4.120.	Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
4.121.	Jumlah Tenaga Edukatif Perguruan Tinggi di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
4.122.	Jumlah Perguruan Tinggi di Bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kabupaten Cirebon
4.123.	Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi di Bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kabupaten Cirebon
4.124.	Jumlah Tenaga Edukatif Perguruan Tinggi di Bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kabupaten Cirebon
4.125.	Jumlah Perguruan Tinggi di Bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
4.126.	Jumlah Mahasiswa Perguruan Tinggi di Bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
4.127.	Jumlah Tenaga Edukatif Perguruan Tinggi di Bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon

**SEKTOR
KESEHATAN**

**DAFTAR DATA STATISTIK SEKTORAL YANG DIHASILKAN OLEH PRODUSEN DATA
DINAS KESEHATAN**

No	Elemen Data
5.1	Jumlah Balita Berdasarkan Kategori Balita Gizi Buruk Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
5.2	Jumlah Kasus Meninggal DBD berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Cirebon
5.3	Jumlah Kasus DBD berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Cirebon
5.4	Jumlah Kematian Pasien Keluar Mati Berdasarkan Rumah Sakit dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon
5.5	Jumlah Kematian Pasien Keluar Mati >48 Jam Dirawat Berdasarkan Rumah Sakit dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon
5.6	Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Ibu Hamil Berdasarkan Jenis Kunjungan Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Cirebon
5.7	Jumlah Bayi Baru Lahir Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Cirebon
5.8	Jumlah Bayi Menerima Inisiasi Menyusui Dini (IMD) Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Cirebon
5.9	Persentase Bayi Menerima Inisiasi Menyusui Dini (IMD) Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Cirebon
5.10	Jumlah Bayi Usia di Bawah 6 Bulan Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Cirebon
5.11	Jumlah Bayi Usia di Bawah 6 Bulan Penerima ASI Eksklusif Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Cirebon
5.12	Persentase Bayi Usia di Bawah 6 Bulan Penerima ASI Eksklusif Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Cirebon
5.13	Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Bayi Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Cirebon
5.14	Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Kelompok Umur Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Cirebon
5.15	Jumlah Kematian Bayi Berdasarkan Kategori Bayi Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Cirebon
5.16	Jumlah Fasilitas Kesehatan Berdasarkan Kepemilikan atau Pengelola di Kabupaten Cirebon
5.17	Jumlah Posyandu Berdasarkan Strata Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Cirebon
5.18	Jumlah Posyandu Aktif Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Cirebon
5.19	Jumlah Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM) Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Cirebon
5.20	Jumlah Dokter Umum Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Cirebon
5.21	Jumlah Dokter Umum Menurut Rumah Sakit di Kabupaten Cirebon
5.22	Jumlah Dokter Spesialis Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Cirebon
5.23	Jumlah Dokter Spesialis Menurut Rumah Sakit di Kabupaten Cirebon
5.24	Jumlah Dokter Gigi Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Cirebon
5.25	Jumlah Dokter Gigi Menurut Rumah Sakit di Kabupaten Cirebon
5.26	Jumlah Dokter Gigi Spesialis Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Cirebon
5.27	Jumlah Dokter Gigi Spesialis Menurut Rumah Sakit di Kabupaten Cirebon
5.28	Jumlah Bidan Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Cirebon
5.29	Jumlah Bidan Menurut Rumah Sakit di Kabupaten Cirebon
5.30	Jumlah Tenaga Keperawatan di Puskesmas Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
5.31	Jumlah Tenaga Keperawatan di Rumah Sakit Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon
5.32	Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kabupaten di Kabupaten Cirebon
5.33	Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat di Rumah Sakit Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon
5.34	Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan di Puskesmas Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kabupaten di Kabupaten Cirebon
5.35	Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan di Rumah Sakit Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon
5.36	Jumlah Tenaga Kesehatan Gizi di Puskesmas Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kabupaten di Kabupaten Cirebon
5.37	Jumlah Tenaga Kesehatan Gizi di Rumah Sakit Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon
5.38	Jumlah Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Cirebon
5.39	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (BER-PHBS) Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Cirebon
5.40	Jumlah Pembinaan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (BER-PHBS) Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Cirebon
5.41	Persentase Pembinaan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (BER-PHBS) Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Cirebon
5.42	Jumlah Balita Kurang Gizi Dengan Indeks Bb/U Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Cirebon

No	Elemen Data
5.43	Jumlah Balita Pendek Dengan Indeks Tb/U Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Cirebon
5.44	Jumlah Balita Kurus Dengan Indeks Bb/Tb Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Cirebon
5.45	Jumlah Kasus HIV Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon
5.46	Jumlah Ibu Nifas yang Mendapatkan VIT A Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Cirebon
5.47	Jumlah Kasus Tuberkulosis Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Cirebon
5.48	Jumlah Kasus Tuberkulosis Pada Anak Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Cirebon
5.49	Jumlah Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Cirebon
5.50	Jumlah Kematian Akibat AIDS Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon
5.51	Jumlah Kasus Kusta Kering Terdaftar Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Cirebon
5.52	Jumlah Kasus Kusta Basah Terdaftar Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Cirebon
5.53	Jumlah Pusat Kesehatan di Kabupaten Cirebon
5.54	Jumlah Puskesmas Rawat Inap dan Non Rawat Inap di Kabupaten Cirebon
5.55	Jumlah Puskesmas Menurut Kecamatan dan Pelayanan di Kabupaten Cirebon
5.56	Jumlah Pustu dan Pusling Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Cirebon
5.57	Jumlah Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus di Kabupaten Cirebon
5.58	Jumlah Klinik/Balai Kesehatan, Posyandu dan Polindes di Kabupaten Cirebon
5.59	Jumlah Rumah Sakit Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon

**SEKTOR
INFRASTRUKTUR**

**DAFTAR DATA STATISTIK SEKTORAL YANG DIHASILKAN OLEH PRODUSEN DATA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN CIREBON**

No	Elemen Data
Bidang Sanitasi	
1.	Jumlah Pengolahan Air Limbah Berdasarkan Desa di Kabupaten Cirebon
2.	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak dan Berkelanjutan Berdasarkan Desa di Kabupaten Cirebon
Bidang Bangunan Gedung	
3	Jumlah Bangunan Memiliki IMB Berdasarkan Tahun di Kabupaten Cirebon
4	Jumlah Bangunan tidak Memiliki IMB Berdasarkan Tahun di Kabupaten Cirebon
Bidang Bina Marga	
5	Panjang Ruas Jalan di Kabupaten Cirebon
6	Panjang Ruas Jalan Berdasarkan Desa di Kabupaten Cirebon
7	Panjang Ruas Jalan Berdasarkan Kondisi Jalan di Kabupaten Cirebon per Tahun
8	Panjang Ruas Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan di Kabupaten Cirebon
9	Panjang Ruas Jalan Berdasarkan Nama Jalan di Kabupaten Cirebon
10	Panjang Drainase Sistem Terbuka di Kabupaten Cirebon
11	Panjang Drainase Sistem Tertutup di Kabupaten Cirebon
12	Jumlah Jembatan Propinsi di Kabupaten Cirebon
13	Jumlah Jembatan Kabupaten/Kota di Kabupaten Cirebon
14	Jumlah Jembatan Berdasarkan Desa di Kabupaten Cirebon
Bidang Sumber Daya Air	
15	Panjang Saluran Irigasi Primer di Kabupaten Cirebon
16	Panjang Saluran Irigasi Sekunder Berdasarkan Desa di Kabupaten Cirebon
17	Panjang Saluran Irigasi Tersier di Kabupaten Cirebon
18	Luas Sawah Beririgasi Teknis di Kabupaten Cirebon
19	Luas Sawah Beririgasi non Teknis Berdasarkan Desa di Kabupaten Cirebon
20	Jumlah Sungai dan Danau/setu di Kabupaten Cirebon
21	Jumlah Embung di Kabupaten Cirebon

Keterangan:

- Bappelitbangda menentukan data prioritas dan non prioritas
- Cara pengumpulan data: (1) Sensus; (2) Survei; (3) Kompilasi Produk Administrasi; dan (4) Cara Lain Sesuai Perkembangan Teknologi

**DAFTAR DATA/INFORMASI GEOSPASIAL YANG DIHASILKAN OLEH PRODUSEN DATA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN CIREBON**

No	Data/Informasi Geospasial
1	Data Jembatan Propinsi di Kabupaten Cirebon
2	Data Jembatan Kabupaten/Kota di Kabupaten Cirebon
3	Data Saluran Irigasi di Kabupaten Cirebon
4	Data Sungai dan Danau/Setu di Kabupaten Cirebon
5	Data Embung di Kabupaten Cirebon

SEKTOR
INFRASTRUKTUR

DAFTAR DATA STATISTIK SEKTORAL YANG DIHASILKAN OLEH PRODUSEN DATA
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

No	Elemen Data
1	Jumlah Tanah Kosong
2	Jumlah Rumah Tangga Terlayani Sistem Perpipaan
3	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh
4	Jumlah Realisasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Berdasarkan Sumber Anggaran
5	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)
6	Jumlah Lingkungan Permukiman yang Sudah Tertata Sumber Anggaran dari Pusat : BPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) Sumber Anggaran dari Banprov : Perbaikan RUTILAHU (Rumah Tidak Layak Huni) Sumber Anggaran APBD 2 : BBRS (Bantuan Bedah Rumah Swadaya)
7	Kegiatan Sanitasi di Kawasan Permukiman Kumuh
8	Kegiatan Pembangunan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) di kawasan Permukiman Kumuh
9	Kegegiatan Jalan Lingkungan di Kawasan Permukiman Kumuh
10	Kegiatan Drainase/TPT (Tembok penahan Tanah) di Kawasan Permukiman Kumuh
11	Jumlah Permukiman Layak Huni
12	Jumlah Pengembang yang Tersertifikasi
13	Jumlah Penyelesaian Penetapan Lokasi
14	Jumlah Penyelesaian Konflik Pertanahan
15	cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU
16	Jumlah PSU perumahan yang diserahkan terimakan ke penda
17	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani
18	Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani
19	Jumlah Rumah Tangga Penerima Fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan
20	Jumlah rumah tangga penerima subsidi uang sewa
21	Jumlah rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni
22	Jumlah rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria pelayanan
23	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani
24	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha
25	Jumlah total unit rumah di Kabupaten
26	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU
27	Luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi
28	Total luas tanah yang diberikan ijin lokasi
29	Luas izin lokasi yang diterbitkan
30	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum
31	Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum
32	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi
33	Jumlah penerima tanah obyek landreform (TOL) dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha
34	Jumlah penerima tanah obyek landreform
35	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah
36	Luas izin membuka tanah yang diterbitkan
37	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani
38	Jumlah pengadilan sengketa tanah garapan
39	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya
40	Jumlah rumah yang terkena bencana alam
41	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam
42	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi
43	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi
44	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi
45	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi
46	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan
47	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM
48	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM
49	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM
50	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM
51	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah
52	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH
53	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh
54	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH
55	Jumlah rumah yang tidak dihuni
56	Jumlah rumah pembangunan baru
57	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU
58	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum
59	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan
60	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (onsite / off site)
61	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH
62	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU
63	Jumlah pengembang yang tersertifikasi
64	Jumlah pengembang yang registrasi
65	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan

Keterangan:

- Bappelitbangda menentukan data prioritas dan non prioritas

- Cara pengumpulan data: (1) Sensus; (2) Survei; (3) Kompilasi Produk Administrasi; dan (4) Cara Lain Sesuai Perkembangan Teknologi

**DAFTAR DATA/INFORMASI GEOSPASIAL YANG DIHASILKAN OLEH PRODUSEN DATA
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

No	Data/Informasi Geospasial
1	Sebaran Perumahan Kabupaten Cirebon
2	Sebaran Perumahan Komersial di Kab. Cirebon
2	Sebaran Rutilahu yang Sudah Diperbaiki
3	Sebaran Kawasan Permukiman Kumuh
4	sebaran Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)
5	sebaran Lingkungan Permukiman yang Sudah Tertata
6	sebaran Permukiman Layak Huni
7	Kegiatan Sanitasi di Kawasan Permukiman Kumuh
8	Kegiatan Pembangunan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) di kawasan Permukiman Kumuh
9	Kegegiatan Jalan Lingkungan di Kawasan Permukiman Kumuh
10	Kegiatan Drainase/TPT (Tembok penahan Tanah) di Kawasan Permukiman Kumuh
11	sebaran Penyelesaian Ijin Lokasi
12	sebaran Penyelesaian Konflik Pertanahan
13	sebaran cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU
14	sebaran PSU perumahan yang diserahkan terimakan ke pemda
15	Sebaran tanah timbul
16	Sebaran tanah kas desa
17	Sebaran Tanah Negara
18	Sebaran Wilayah Rawan Konflik Pertanahan

SEKTOR
INFRASTRUKTUR

DAFTAR DATA STATISTIK SEKTORAL YANG DIHASILKAN OLEH PRODUSEN DATA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN CIREBON

No	Elemen Data
1	Jumlah kejadian kebakaran bangunan berdasarkan desa di Kabupaten Cirebon
2	Jumlah kerusakan bangunan akibat kebakaran berdasarkan desa di Kabupaten Cirebon
3	Jumlah kerusakan kendaraan akibat kebakaran berdasarkan desa di Kabupaten Cirebon
4	Jumlah kerusakan fasilitas umum akibat kebakaran berdasarkan desa di Kabupaten Cirebon
5	Jumlah korban jiwa akibat kebakaran berdasarkan desa di Kabupaten Cirebon
6	Jumlah penyelamatan Evakuasi sarang tawon berdasarkan desa di Kabupaten Cirebon
7	Jumlah penyelamatan Evakuasi Ular berdasarkan desa di Kabupaten Cirebon
8	Jumlah penyelamatan Evakuasi Cincin Kejepit berdasarkan desa di Kabupaten Cirebon
9	Jumlah penyelamatan Evakuasi Penyelamatan Kucing berdasarkan desa di Kabupaten Cirebon
10	Jumlah penyelamatan Evakuasi Penyelamatan Orang Bunuh Diri berdasarkan desa di Kabupaten Cirebon
11	Jumlah penyelamatan Penyemprotan Lumpur Pasca Banjir berdasarkan desa di Kabupaten Cirebon
12	Jumlah penyelamatan Evakuasi Pohon Tumbang berdasarkan desa di Kabupaten Cirebon
13	Jumlah penyelamatan Evakuasi Kendaraan berdasarkan desa di Kabupaten Cirebon
14	Jumlah penyelamatan Evakuasi Monyet Liar berdasarkan desa di Kabupaten Cirebon
15	Jumlah penyelamatan Evakuasi Biawak berdasarkan desa di Kabupaten Cirebon

Keterangan:

- Bappelitbangda menentukan data prioritas dan non prioritas
- Cara pengumpulan data: (1) Sensus; (2) Survei; (3) Kompilasi Produk Administrasi; dan (4) Cara Lain Sesuai Perkembangan Teknologi

**SEKTOR
PEMERINTAHAN**

**DAFTAR DATA STATISTIK SEKTORAL YANG DIHASILKAN OLEH PRODUSEN DATA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

No	Elemen Data
1	Jumlah Kasus Unjuk Rasa Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
2	Jumlah Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
3	Jumlah Penertiban Reklame Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
4	Jumlah Penertiban Baliho Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
5	Jumlah Penertiban Bangunan Liar Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
6	Jumlah Penertiban Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
7	Jumlah Penertiban Razia Minuman Keras (Miras) Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
8	Jumlah Penertiban Razia Tempat Hiburan Malam Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
9	Jumlah Penertiban Razia Tempat Pekerja Seks Komersial (PSK) Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
10	Jumlah Penertiban Razia Tempat Kos Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
11	Jumlah Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Berdasarkan Kategori di Kabupaten Cirebon
12	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah Berdasarkan Tahun di Kabupaten Cirebon
13	Jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Berdasarkan Status Kepegawaian di Kabupaten Cirebon

Keterangan:

- Bappelitbangda menentukan data prioritas dan non prioritas

- Cara pengumpulan data: (1) Sensus; (2) Survei; (3) Kompilasi Produk Administrasi; dan (4) Cara Lain Sesuai Perkembangan Teknologi

**DAFTAR DATA/INFORMASI GEOSPASIAL YANG DIHASILKAN OLEH PRODUSEN DATA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

No	Data/Informasi Geospasial
1	
2	
3	
4	
5	

**SEKTOR
SOSIAL BUDAYA**

**DAFTAR DATA STATISTIK SEKTORAL YANG DIHASILKAN OLEH PRODUSEN DATA
DINAS SOSIAL**

No	Elemen Data
1	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Jenis Pelayanan di Kabupaten Cirebon
2	Jumlah Karang Taruna (KT) Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
3	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
4	Jumlah Lansia di Kabupaten Cirebon
5	Jumlah Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Cirebon
6	Jumlah Anak Terlantar di Kabupaten Cirebon
7	Jumlah Anak Berhadapan Dengan Hukum di Kabupaten Cirebon
8	Jumlah Penyandang Disabilitas Berdasarkan Ragam Disabilitas di Kabupaten Cirebon
9	Jumlah Korban Trafficking di Kabupaten Cirebon
10	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) di Kabupaten Cirebon
11	Jumlah Kepala Keluarga yang Menerima Bantuan PKH di Kabupaten Cirebon
12	Jumlah Anggota Keluarga yang Menerima Bantuan PKH di Kabupaten Cirebon
13	Jumlah Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Cirebon
14	Jumlah Korban Bencana Alam yang menerima bantuan sosial di Kabupaten Cirebon
15	Jumlah Pekerja Sosial di Kabupaten Cirebon
16	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Kabupaten Cirebon
17	Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Berdasarkan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Kabupaten Cirebon
18	Jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA) di Kabupaten Cirebon
19	Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Berdasarkan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) di Kabupaten Cirebon
20	Jumlah Penyuluh Sosial di Kabupaten Cirebon
21	Jumlah Penyandang Disabilitas yang Menerima Bantuan di Kabupaten Cirebon
22	Jumlah Pekerja Pabrik Rokok Penerima Royalti Cukai Rokok di Kabupaten Cirebon
23	Jumlah Kelompok KUBE yang menerima bantuan di Kabupaten Cirebon
24	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten Cirebon
25	Jumlah penerima PBI Jaminan Kesehatan di Kabupaten Cirebon
26	Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Berdasarkan Pekerja Sosial Profesional (PSP) di Kabupaten Cirebon
27	Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Berdasarkan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di Kabupaten Cirebon
28	Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Berdasarkan Karang Taruna (KT) di Kabupaten Cirebon
29	Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Berdasarkan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial (LK3) di Kabupaten Cirebon
30	Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Berdasarkan Keluarga Pioner (KP) di Kabupaten Cirebon
31	Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Berdasarkan Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga berbasis Masyarakat (WKSBM) di Kabupaten Cirebon
32	Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Berdasarkan Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS) di Kabupaten Cirebon
33	Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Berdasarkan Penyuluh Sosial (PS) di Kabupaten Cirebon
34	Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Berdasarkan Tenaga Kerja Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kabupaten Cirebon
35	Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Berdasarkan Dunia Usaha (DU) di Kabupaten Cirebon
36	Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Berdasarkan Organisasi Sosial (ORSOS) di Kabupaten Cirebon
37	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Berdasarkan Jenis Masalah di Kabupaten Cirebon
38	Jumlah Pemilik Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Yang Memiliki Lahan Sendiri di Kabupaten Cirebon
39	Jumlah Sarana Sosial di Kabupaten Cirebon

Keterangan:

- Bappelitbangda menentukan data prioritas dan non prioritas
- Cara pengumpulan data: (1) Sensus; (2) Survei; (3) Kompilasi Produk Administrasi; dan (4) Cara Lain Sesuai Perkembangan Teknologi

**DAFTAR DATA/INFORMASI GEOSPASIAL YANG DIHASILKAN OLEH PRODUSEN DATA
DINAS SOSIAL**

No	Data/Informasi Geospasial
1	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Jenis Pelayanan
2	Jumlah Karang Taruna (KT) Menurut Kecamatan
3	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Menurut Kecamatan
4	Jumlah Lansia
5	Jumlah Gelandangan dan Pengemis
6	Jumlah Anak Terlantar
7	Jumlah Anak Berhadapan Dengan Hukum
8	Jumlah Penyandang Disabilitas Berdasarkan Ragam Disabilitas
9	Jumlah Korban Trafficking
10	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)
11	Jumlah Kepala Keluarga yang Menerima Bantuan PKH
12	Jumlah Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
13	Jumlah Korban Bencana Alam yang menerima bantuan sosial
14	Jumlah Pekerja Sosial
15	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
16	Jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
17	Jumlah Penyuluh Sosial
18	Jumlah Penyandang Disabilitas yang Menerima Bantuan
19	Jumlah Pekerja Pabrik Rokok Penerima Royalthi Cukai Rokok
20	Jumlah Kelompok KUBE yang menerima bantuan
21	DTKS
22	Jumlah penerima PBI Jaminan Kesehatan

**SEKTOR
SOSIAL BUDAYA**

**DAFTAR DATA STATISTIK SEKTORAL YANG DIHASILKAN OLEH PRODUSEN DATA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN CIREBON**

No	Elemen Data
1	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon
2	Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor Pekerjaan di Kabupaten Cirebon
3	Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Komoditi di Kabupaten Cirebon
4	Jumlah Lowongan Kerja Terdaftar Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon
5	Jumlah PMI Yang Mendaftar di LTSA-P2MI Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon
6	Jumlah PMI Yang Mendaftar di LTSA-P2MI Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Cirebon
7	Jumlah PMI Yang Mendaftar di LTSA-P2MI Berdasarkan Negara Penempatan di Kabupaten Cirebon
8	Jumlah PMI Yang Mendaftar di LTSA-P2MI Berdasarkan P3MI di Kabupaten Cirebon
9	Jumlah PMI Yang Mendaftar di LTSA-P2MI Berdasarkan Jabatan Pekerjaan di Kabupaten Cirebon
10	Jumlah Penempatan PMI Asal Kabupaten Cirebon Berdasarkan Negara Penempatan
11	Jumlah Penempatan PMI Asal Kabupaten Cirebon Berdasarkan P3MI
12	Jumlah Penempatan PMI Asal Kabupaten Cirebon Berdasarkan Jenis Kelamin
13	Jumlah Kepulangan PMI Asal Kabupaten Cirebon Berdasarkan Negara Penempatan
14	Jumlah Kepulangan PMI Asal Kabupaten Cirebon Berdasarkan P3MI
15	Jumlah Kepulangan PMI Asal Kabupaten Cirebon Berdasarkan Jenis Kelamin
16	Jumlah Pencari Kerja berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Cirebon
17	Jumlah Pencari Kerja berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon
18	Jumlah Pencari Kerja Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
19	Jumlah Informasi Lowongan Kerja berdasarkan Jabatan di Kabupaten Cirebon
20	Jumlah Informasi Lowongan Kerja berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon
21	Jumlah Informasi Lowongan Kerja berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Cirebon
22	Jumlah Tenaga Kerja Asing berdasarkan TKA online Daerah di Kabupaten Cirebon
23	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan Laporan WLL 2 di Kabupaten Cirebon
24	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Disabilitas berdasarkan Laporan WLL 2 Disabilitas di Kabupaten Cirebon
25	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang terdaftar di Kabupaten Cirebon
26	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) yang terdaftar di Kabupaten Cirebon
27	Jumlah Lowongan Kerja Terdaftar Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon
28	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di Kabupaten Cirebon
29	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Luar Negeri (LPKLN) di Kabupaten Cirebon
30	Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Perusahaan di Kabupaten Cirebon
31	Jumlah Kasus Perselisihan Masuk Berdasarkan Jenis Perselisihan di Kabupaten Cirebon
32	Jumlah Kasus Hubungan Industrial Berdasarkan Jenis Kasus di Kabupaten Cirebon
33	Jumlah Penduduk yang Bekerja Berdasarkan Golongan Umur di Kabupaten Cirebon
34	Jumlah Penduduk yang Bekerja Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon
35	Jumlah Penduduk Usia Kerja Berdasarkan Golongan Umur di Kabupaten Cirebon
36	Jumlah Penduduk Usia Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon
37	Jumlah Penduduk Bekerja Berdasarkan Pekerja Formal/Informal di Kabupaten Cirebon
38	Jumlah Penduduk yang Bekerja Paruh Waktu Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon
39	Jumlah Penduduk yang Bekerja Paruh Waktu Berdasarkan Golongan Umur di Kabupaten Cirebon
40	Presentase Penduduk Bekerja Berdasarkan Pekerja Formal/Informal di Kabupaten Cirebon

Keterangan:

- Bappelitbangda menentukan data prioritas dan non prioritas
- Cara pengumpulan data: (1) Sensus; (2) Survei; (3) Kompilasi Produk Administrasi; dan (4) Cara Lain Sesuai Perkembangan

**DAFTAR DATA/INFORMASI GEOSPASIAL YANG DIHASILKAN OLEH PRODUSEN DATA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN CIREBON**

No	Data/Informasi Geospasial
1	UPT Pelatihan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon
2	LTSA-P2MI Kabupaten Cirebon
3	Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di Kabupaten Cirebon
4	Lembaga Pelatihan Kerja Luar Negeri (LPKLN) di Kabupaten Cirebon
5	Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) di Kabupaten Cirebon
6	Perusahaan Yang Beroperasi di Kabupaten Cirebon

**SEKTOR
SOSIAL BUDAYA**

**DAFTAR DATA STATISTIK SEKTORAL YANG DIHASILKAN OLEH PRODUSEN DATA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

No	Elemen Data
1	Jumlah Pasangan Usia Subur Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
2	Jumlah Pasangan Usia Subur Peserta Keluarga Berencana (KB) Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
3	Jumlah Pasangan Usia Subur Bukan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
4	Jumlah Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
5	Jumlah Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif Berdasarkan Jenis Kontrasepsi Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
6	Jumlah Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif Berdasarkan Metode KB dan Jenis Kontrasepsi Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
7	Jumlah Lokasi Kampung Keluarga Berencana (KB) Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
8	Jumlah Kader Pos Keluarga Berencana dan Sub Keluarga Berencana Menurut Desa di Kabupaten Cirebon
9	Jumlah Balai Penyuluh KB di Kabupaten Cirebon
10	Jumlah Penyuluh KB (PLKB) di Kabupaten Cirebon
11	Pencapaian Akseptor Baru
12	Jumlah Unmet Need Keluarga Berencana (KB) Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
13	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang Telah Memiliki Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Cirebon
14	Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Bentuk Kekerasan di Kabupaten Cirebon
15	Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Kelompok Usia di Kabupaten Cirebon
16	Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon
17	Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Cirebon
18	Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Pekerjaan di Kabupaten Cirebon
19	Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Jenis Pelayanan Penyelesaian Kekerasan di Kabupaten Cirebon
20	Jumlah Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak P2T/P2A Kabupaten Cirebon
21	Jumlah Korban Kekerasan pada Penyandang Difabel di Kabupaten Cirebon
22	Jumlah Korban Kekerasan yang Terlayani di Kabupaten Cirebon
23	Jumlah Kasus Kekerasan Berdasarkan Tempat Kejadian di Kabupaten Cirebon
24	Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Cirebon
25	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan DPPKBP3A
26	Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) di Kabupaten Cirebon
27	Jumlah Kelompok Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja di Kabupaten Cirebon
28	Jumlah Tenaga Penggerak Desa (TPD) Teladan Tingkat Kabupaten Cirebon
29	Jumlah Tenaga Penggerak Desa (TPD) Teladan Tingkat Kecamatan di Kabupaten Cirebon
30	Jumlah Lokasi Desa Stunting
31	Jumlah Motivator Ketahanan Keluarga (Motekar) di Kabupaten Cirebon
32	Jumlah Pekerja Perempuan di Intansi Pemerintah Kabupaten Cirebon
33	Jumlah Angkatan Kerja Perempuan yang Berumur 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Cirebon
34	Indeks Pembangunan Gender Berdasarkan Tahun di Kabupaten Cirebon
35	Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Status (Korban/Pelaku/Saksi) di Kabupaten Cirebon
36	Jumlah Perempuan Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Status (Korban/Pelaku) di Kabupaten Cirebon
37	Jumlah Satgas Perlindungan Pegawai Migran Indonesia (PMI) Bermasalah di Kabupaten Cirebon
38	Jumlah Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Kabupaten Cirebon
39	Jumlah Desa Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Kabupaten Cirebon

Keterangan:

- Bappelitbangda menentukan data prioritas dan non prioritas
- Cara pengumpulan data: (1) Sensus; (2) Survei; (3) Kompilasi Produk Administrasi; dan (4) Cara Lain Sesuai Perkembangan Teknologi

**DAFTAR DATA/INFORMASI GEOSPASIAL YANG DIHASILKAN OLEH PRODUSEN DATA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

No	Data/Informasi Geospasial
1	Lembaga Layanan Anak yang Telah Memiliki Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Cirebon
2	Balai Penyuluh KB di Kabupaten Cirebon
3	Kampung Keluarga Berencana (KB)

**SEKTOR
INFRASTRUKTUR**

**DAFTAR DATA STATISTIK SEKTORAL YANG DIHASILKAN OLEH PRODUSEN DATA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

No	Elemen Data
1	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
2	INDEKS KUALITAS AIR
3	INDEKS KUALITAS UDARA
4	INDEKS TUTUPAN LAHAN
5	PROSENTASE PENGELOLAAN SAMPAH
6	PROSENTASE KETAATAN PENANGGUNGJAWAB USAHA
7	DATA IZIN LINGKUNGAN
8	DATA PENANGANAN PENGADUAN SENGKETA LINGKUNGAN

Keterangan:

- Bappelitbangda menentukan data prioritas dan non prioritas
- Cara pengumpulan data: (1) Sensus; (2) Survei; (3) Kompilasi Produk Administrasi; dan (4) Cara Lain Sesuai Perkembangan Teknologi

**DAFTAR DATA/INFORMASI GEOSPASIAL YANG DIHASILKAN OLEH PRODUSEN DATA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

No	Data/Informasi Geospasial
1	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
2	INDEKS KUALITAS AIR
3	INDEKS KUALITAS UDARA
4	INDEKS TUTUPAN LAHAN
5	DATA IZIN LINGKUNGAN

**SEKTOR
PEMERINTAH**

**DAFTAR DATA STATISTIK SEKTORAL YANG DIHASILKAN OLEH PRODUSEN DATA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

No	Elemen Data
1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon
2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Cirebon
3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia di Kabupaten Cirebon
4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kategori Produktivitas di Kabupaten Cirebon
5	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan di Kabupaten Cirebon
6	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kabupaten Cirebon
7	Jumlah Penduduk Pemilik KTP Elektronik di Kabupaten Cirebon
8	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan di Kabupaten Cirebon
9	Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Kabupaten Cirebon
10	Jumlah Penduduk Menikah Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
11	Jumlah Penduduk Masuk ke Kabupaten Cirebon
12	Jumlah Penduduk Pindah dari Kabupaten Cirebon
13	Jumlah Realisasi Akta di Kabupaten Cirebon
14	Jumlah Penduduk Disabilitas Berdasarkan Jenis Kelamin
15	Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas Berdasarkan Kategori Disabilitas
16	Jumlah Penduduk Wajib KTP Berdasarkan Jenis Kelamin
17	Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP Berdasarkan Status Proses KTP
18	Jumlah Penduduk Belum Memiliki KTP Elektronik
19	Jumlah Penduduk Cerai Mati Berdasarkan Kelompok Umur
20	Jumlah Penduduk Berdasarkan Cerai Hidup Berdasarkan Kelompok Umur
21	Jumlah Penduduk Kawin Berdasarkan Kelompok Umur
22	Jumlah Penduduk Belum Kawin Berdasarkan Kelompok Umur
23	Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
24	Laju Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Tahun
25	Jumlah RT/RW per Desa/Kelurahan Berdasarkan Kecamatan
26	Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan dan Desa/Kelurahan
27	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Kepercayaan dan Desa/Kelurahan
28	Jumlah Perpindahan Penduduk Berdasarkan Desa
29	Jumlah Penduduk Meninggal Berdasarkan Desa/Kelurahan
30	Jumlah Penduduk Umur 0 - 17 Tahun Berdasarkan Kepemilikan Akta Kelahiran
31	Jumlah Akta Kematian

Keterangan:

- Bappelitbangda menentukan data prioritas dan non prioritas
- Cara pengumpulan data: (1) Sensus; (2) Survei; (3) Kompilasi Produk Administrasi; dan (4) Cara Lain Sesuai Perkembangan Teknologi

**DAFTAR DATA/INFORMASI GEOSPASIAL YANG DIHASILKAN OLEH PRODUSEN DATA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

No	Data/Informasi Geospasial
1	
2	
3	
4	
5	

**DAFTAR DATA STATISTIK SEKTORAL YANG DIHASILKAN OLEH PRODUSEN DATA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIREBON**

No	Elemen Data
15.1.	Jumlah Juru Parkir yang Dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon
15.2.	Jumlah Kantong Parkir yang Dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon
15.3.	Jumlah Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Cirebon
15.4.	Jumlah Moda Angkutan Berdasarkan Kategori di Kabupaten Cirebon
15.5.	Jumlah Juru Parkir yang Dikelola Dinas Perhubungan Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
15.6.	Jumlah Kantong Parkir yang Dikelola Dinas Perhubungan Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
15.7.	Jumlah Penerangan Jalan Umum Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
15.8.	Jumlah Tempat Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cirebon
15.9.	Jumlah Kendaraan Angkutan Perdesaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
15.10.	Jumlah Angkutan Menurut Moda Angkutan dan Kecamatan di Kabupaten Cirebon
15.11.	Jumlah Kendaraan umum Menurut Jenis Kendaraan dan Hasil Uji Keselamatan di Kabupaten Cirebon
15.12.	Jumlah Terminal Tipe C di Kabupaten Cirebon
15.13.	Jumlah Penumpang Masuk dan Keluar Melalui Terminal Tipe C di Kabupaten Cirebon
15.14.	Daftar Terminal Berdasarkan Tipe di Kabupaten Cirebon
15.15.	Jumlah Terminal Berdasarkan Tipe di Kabupaten Cirebon
15.16.	Jumlah Kendaraan yang Diuji dan Wajib Uji di Kabupaten Cirebon
15.17.	Jumlah Pemasangan Perlengkapan Jalan Kabupaten di Kabupaten Cirebon
15.18.	Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cirebon
15.19.	Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
15.20.	Jumlah Kendaraan Bermotor Berdasarkan Jenis Kendaraan di Kabupaten Cirebon
15.21.	Jumlah Kendaraan Bermotor Berdasarkan Jenis Kendaraan Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon

Keterangan:

- Bappelitbangda menentukan data prioritas dan non prioritas
- Cara pengumpulan data: (1) Sensus; (2) Survei; (3) Kompilasi Produk Administrasi; dan (4) Cara Lain Sesuai Perkembangan Te

**DAFTAR DATA/INFORMASI GEOSPASIAL YANG DIHASILKAN OLEH PRODUSEN DATA
DINAS PERHUBUNGAN**

No	Data/Informasi Geospasial
1	Sebaran Jumlah PJU di Kabupaten Cirebon
2	Daftar Terminal di Kabupaten Cirebon
3	Tempat Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cirebon

**SEKTOR
EKONOMI**

**DAFTAR DATA STATISTIK SEKTORAL YANG DIHASILKAN OLEH PRODUSEN DATA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

No	Elemen Data
17.1.	Jumlah Objek Wisata Menurut Kategori di Kabupaten Cirebon
17.2	Nama Objek Wisata Menurut Kategori di Kabupaten Cirebon
17.3.	Jumlah Desa Wisata di Kabupaten Cirebon
17.4.	Jumlah Hotel Berdasarkan Jenis Hotel di Kabupaten Cirebon
17.5.	Jumlah Akomodasi (Kamar) Hotel Berdasarkan Jenis Hotel di Kabupaten Cirebon
17.6.	Jumlah Rumah Makan Berdasarkan Tahun di Kabupaten Cirebon
17.7.	Jumlah Rumah Makan Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
17.8.	Jumlah Wisatawan Berdasarkan Kategori di Kabupaten Cirebon
17.9.	Jumlah Pengunjung Hotel Berdasarkan Jenis Wisatawan di Kabupaten Cirebon
17.10.	Jumlah Pengunjung Hotel Berdasarkan Jenis Hotel dan Jenis Wisatawan di Kabupaten Cirebon
17.11.	Jumlah Pengunjung Museum dan Event Berdasarkan Jenis Wisatawan di Kabupaten Cirebon
17.12.	Jumlah Pengunjung Objek Wisata Berdasarkan Jenis Wisatawan di Kabupaten Cirebon
17.13.	Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata di Kabupaten Cirebon
17.14.	Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata Tersertifikasi di Kabupaten Cirebon
17.15.	Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Berdasarkan Tahun di Kabupaten Cirebon
17.16.	Jumlah Hunian Akomodasi di Kabupaten Cirebon
17.17.	Nama Cagar Budaya Berdasarkan Kategori di Kabupaten Cirebon
18	Nama Objek Diduga Cagar Budaya Berdasarkan Kategori di Kabupaten Cirebon
19	Jumlah Pemelihara Benda Cagar Budaya Berdasarkan Tahun di Kabupaten Cirebon
20	Jumlah Koleksi Musium berdasarkan Jenis di Kabupaten Cirebon
21	Jumlah Sanggar Kesenian Berdasarkan Tahun di Kabupaten Cirebon
22	Nama Sanggar Kesenian di Kabupaten Cirebon
23	Jumlah Kelompok/Komunitas Seni Berdasarkan Tahun di Kabupaten Cirebon
24	Jumlah Kelompok/Komunitas Seni Berdasarkan Tahun dan Kecamatan di Kabupaten Cirebon
25	Jumlah Kesenian Musik Berdasarkan Jenis di Kabupaten Cirebon
26	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dimanfaatkan Berdasarkan Jenisnya di Kabupaten Cirebon
27	Daftar Nama Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dimanfaatkan Berdasarkan Jenisnya di Kabupaten Cirebon

Keterangan:

- Bappelitbangda menentukan data prioritas dan non prioritas
- Cara pengumpulan data: (1) Sensus; (2) Survei; (3) Kompilasi Produk Administrasi; dan (4) Cara Lain Sesuai Perkembangan Teknologi

**DAFTAR DATA/INFORMASI GEOSPASIAL YANG DIHASILKAN OLEH PRODUSEN DATA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

No	Data/Informasi Geospasial
1	Data Persebaran Objek Wisata di Kabupaten Cirebon
2	Data Persebaran Cagar Budaya di Kabupaten Cirebon
3	Data Persebaran Objek Diduga Cagar Budaya di Kabupaten Cirebon
4	Data Persebaran Hotel di Kabupaten Cirebon
5	Data Persebaran Rumah Makan di Kabupaten Cirebon
6	Data Persebaran Museum di Kabupaten Cirebon
7	Data Persebaran Desa Wisata di Kabupaten Cirebon

**SEKTOR
SOSIAL BUDAYA**

**DAFTAR DATA STATISTIK SEKTORAL YANG DIHASILKAN OLEH PRODUSEN DATA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

No	Elemen Data
1	Jumlah Pemuda Usia 16-30 Tahun Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
2	Jumlah Wirausahawan Muda
3	Daftar Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Cirebon
4	Jumlah Lapangan Bola Voli
5	Jumlah Lapangan Bola Basket
6	Jumlah Lapangan Tenis
7	Jumlah Lapangan Futsal
8	Jumlah Stadion Sepak Bola
9	Jumlah Stadion Atletik
10	Jumlah Lapangan Bulu Tangkis
11	Jumlah Gedung Olahraga
12	Jumlah Kolam Renang
13	Jumlah Lapangan Olahraga Terbuka
14	Jumlah Pemuda yang Aktif dalam Kepramukaan
15	Jumlah Instruktur Olahraga Berdasarkan Jenis Kelamin
16	Jumlah Tenaga Pendukung Keolahragaan Berdasarkan Jenis Kelamin
17	Jumlah Atlet Berdasarkan Jenis Kelamin
18	Jumlah Atlet Pusat Pendidikan dan Pelatihan (PPLP) Keolahragaan Berdasarkan Kelas Sekolah
19	Jumlah Atlet Pusat Pendidikan dan Pelatihan (PPLP) Keolahragaan Berdasarkan Jenis Cabang Olahraga
20	Jumlah Atlet Pusat Pendidikan dan Pelatihan (PPLP) Keolahragaan Berdasarkan Jenis Kelamin
21	Jumlah Klub Olahraga
22	Jumlah Anggota Klub Usia Dini/Junior Berdasarkan Jenis Kelamin
23	Jumlah Anggota Klub Senior Berdasarkan Jenis Kelamin
24	Jumlah Anggota Klub Lainnya Berdasarkan Jenis Kelamin
25	Jumlah Pelatih Berdasarkan Jenis Kelamin
26	Jumlah Wasit/Juri Berdasarkan Jenis Kelamin
27	Jumlah Lembaga Pengelola Olahraga
28	Jumlah Sarana Prasarana Olahraga
29	Jumlah Sarana Prasarana Kepemudaan
30	Jumlah Induk Organisasi Badan Keolahragaan Tradisional
31	Jumlah Perolehan Medali Pekan Olahraga Daerah Berdasarkan Periode
32	Jumlah Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
33	Jumlah Pemuda Pelopor Menurut Kecamatan
34	Jumlah Sumberdaya Keolahragaan
35	Jumlah Sarjana Penggerak Pendamping Pembangunan di Pedesaan
36	Jumlah Sarjana Penggerak Pendamping Pembangunan Olahraga
37	Jumlah Induk Organisasi Badan Keolahragaan Fungsional

Keterangan:

- Bappelitbangda menentukan data prioritas dan non prioritas

- Cara pengumpulan data: (1) Sensus; (2) Survei; (3) Kompilasi Produk Administrasi; dan (4) Cara Lain Sesuai Perkembangan Teknologi

**DAFTAR DATA/INFORMASI GEOSPASIAL YANG DIHASILKAN OLEH PRODUSEN DATA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

No	Data/Informasi Geospasial
1	
2	
3	
4	
5	

SEKTOR
EKONOMI

DAFTAR DATA STATISTIK SEKTORAL YANG DIHASILKAN OLEH PRODUSEN DATA
DINAS PERTANIAN

No	Elemen Data
19.1	Luas Areal Tanam Padi Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
19.2	Luas Panen Padi Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
19.3	Produktivitas Padi Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
19.4	Produksi Padi Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
19.5	Produksi Beras Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
19.6	Luas Areal Tanam Bawang Merah Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
19.7	Luas Panen Bawang Merah Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
19.8	Produktivitas Bawang Merah Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
19.9	Produksi Bawang Merah Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
19.10	Luas Areal Tanam Kelapa Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
19.11	Produksi Kelapa Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
19.12	Luas Areal Tanam Mangga Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
19.13	Luas Panen Mangga Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
19.14	Produksi Mangga Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
19.15	Provitas Mangga per Pohon Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
19.16	Luas Areal Tanam Cabe Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
19.17	Luas Panen Cabe Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
19.18	Produktivitas Cabe Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
19.19	Produksi Cabe Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
19.20	Luas Areal Tanaman Tebu Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
19.21	Produksi Tebu Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
19.22	Luas Areal Tanaman Berdasarkan Jenis Komoditi di Kabupaten Cirebon
19.23	Luas Panen Tanaman Berdasarkan Jenis Komoditi di Kabupaten Cirebon
19.24	Produksi Tanaman Berdasarkan Jenis Komoditi di Kabupaten Cirebon
19.25	Jumlah Ternak Ruminansia di Kabupaten Cirebon
19.26	Jumlah Sapi Potong Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
19.27	Jumlah Sapi Perah Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
19.28	Jumlah Kerbau Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
19.29	Jumlah Kuda Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
19.30	Jumlah Domba Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
19.31	Jumlah Kambing Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
19.32	Jumlah Kelinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
19.33	Jumlah Ternak Unggas di Kabupaten Cirebon
19.34	Jumlah Ayam Buras Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
19.35	Jumlah Ayam Ras Pedaging Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
19.36	Jumlah Ayam Ras Petelur Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
19.37	Jumlah Itik Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
19.38	Jumlah Itik Manila/Entok Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
19.39	Jumlah Merpati Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
19.40	Jumlah Puyuh Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
19.41	Produksi Daging Ternak di Kabupaten Cirebon
19.42	Produksi Daging Sapi Potong Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
19.43	Produksi Daging Sapi Perah Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
19.44	Produksi Daging Kerbau Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
19.45	Produksi Daging Kuda Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
19.46	Produksi Daging Domba Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
19.47	Produksi Daging Kambing Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
19.48	Produksi Daging Kelinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
19.49	Produksi Daging Unggas di Kabupaten Cirebon
19.50	Produksi Daging Ayam Buras Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
19.51	Produksi Daging Ayam Ras Pedaging Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
19.52	Produksi Daging Ayam Ras Petelur Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
19.53	Produksi Daging Itik Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
19.54	Produksi Daging Itik Manila/Entok Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
19.55	Produksi Daging Merpati Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
19.56	Produksi Daging Puyuh Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
19.57	Produksi Telur Unggas di Kabupaten Cirebon
19.58	Produksi Telur Ayam Buras Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
19.59	Produksi Telur Ayam Ras PeTelur Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
19.60	Produksi Telur Ayam Ras Petelur Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
19.61	Produksi Telur Itik Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
19.62	Produksi Telur Itik Manila/Entok Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
19.63	Produksi Telur Merpati Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon

No	Elemen Data
19.64	Produksi Telur Puyuh Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
19.65	Produksi Susu Sapi di Kabupaten Cirebon
19.66	Produksi Susu Sapi Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon

Keterangan:

- Bappelitbangda menentukan data prioritas dan non prioritas
- Cara pengumpulan data: (1) Sensus; (2) Survei; (3) Kompilasi Produk Administrasi; dan (4) Cara Lain Sesuai Perkembangan Teknologi

**DAFTAR DATA/INFORMASI GEOSPASIAL YANG DIHASILKAN OLEH PRODUSEN DATA
DINAS PERTANIAN**

No	Data/Informasi Geospasial
1	
2	
3	
4	
5	

SEKTOR
EKONOMI

DAFTAR DATA STATISTIK SEKTORAL YANG DIHASILKAN OLEH PRODUSEN DATA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

No	Elemen Data
20.1	Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Cirebon
20.2	Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
20.3	Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Cirebon
20.4	Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
20.5	Produksi Perikanan Tangkap Berdasarkan Jenis Penangkapan di Kabupaten Cirebon
20.6	Nilai Produksi Perikanan Tangkap Berdasarkan Jenis Penangkapan di Kabupaten Cirebon
20.7	Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum di Kabupaten Cirebon
20.8	Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
20.9	Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum di Kabupaten Cirebon
20.10	Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
20.11	Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum Berdasarkan Lokasi di Kabupaten Cirebon
20.12	Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum Berdasarkan Lokasi di Kabupaten Cirebon
20.13	Produksi Perikanan Budidaya di Kabupaten Cirebon
20.14	Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
20.15	Nilai Produksi Perikanan Budidaya di Kabupaten Cirebon
20.16	Nilai Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
20.17	Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Budidaya di Kabupaten Cirebon
20.18	Nilai Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Budidaya di Kabupaten Cirebon
20.19	Jumlah Nelayan Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Jenis Nelayan di Kabupaten Cirebon
20.20	Jumlah Kapal Menurut Kecamatan dan Kategori Kapal di Kabupaten Cirebon
20.21	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Jenis Budidaya di Kabupaten Cirebon
20.22	Jumlah Petambak Garam Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
20.23	Luas Lahan Garam Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
20.24	Jumlah Produksi Garam Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon

Keterangan:

- Bappelitbangda menentukan data prioritas dan non prioritas

- Cara pengumpulan data: (1) Sensus; (2) Survei; (3) Kompilasi Produk Administrasi; dan (4) Cara Lain Sesuai Perkembangan Teknologi

DAFTAR DATA/INFORMASI GEOSPASIAL YANG DIHASILKAN OLEH PRODUSEN DATA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

No	Data/Informasi Geospasial
1	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2	BALAI BENIH IKAN
3	GUDANG CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH (CPPD)
4	RUMAH KEMASAN
5	TPI GEBANG
6	TPI KARANGREJA
7	TPI MUNDU
8	TPI LOSARI
9	TPI BUNGKO LOR
10	TPI BONDET
11	TAMBAK AMBULU
12	COOL STORAGE

**SEKTOR
EKONOMI**

**DAFTAR DATA STATISTIK SEKTORAL YANG DIHASILKAN OLEH PRODUSEN DATA
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN CIREBON**

No	Elemen Data
21.1.	Jumlah Pedagang Berdasarkan Jenis Kelamin di Pasar Pemda Kabupaten Cirebon
21.2.	Jumlah Pedagang Berdasarkan Tahun di Pasar Pemda Kabupaten Cirebon
21.3.	Jumlah Industri Berdasarkan Unit Usaha dan Tahun di Kabupaten Cirebon
21.4.	Jumlah Tenaga Kerja pada Industri Berdasarkan Unit Usaha di Kabupaten Cirebon
21.5.	Nilai Investasi pada Industri Berdasarkan Unit Usaha di Kabupaten Cirebon
21.6.	Jumlah Perusahaan Menurut Jenis Komoditi Industri Unggulan di Kabupaten Cirebon
21.7.	Jumlah Tenaga Kerja Menurut Jenis Komoditi Industri Unggulan di Kabupaten Cirebon
21.8.	Nilai Investasi Industri Menurut Jenis Komoditi Unggulan di Kabupaten Cirebon (ribu rupiah),
21.9.	Kapasitas Produksi Industri Menurut Jenis Komoditi Unggulan di Kabupaten Cirebon
21.10.	Nilai Produksi Industri Menurut Jenis Komoditi Industri Unggulan di Kabupaten Cirebon (ribu rupiah)
21.11.	Rata-rata Harga Eceran Bahan Pokok Menurut Bulan di Kabupaten Cirebon (rupiah/satuan),
21.12.	Rata-rata Harga Eceran Bahan Pokok Menurut Tahun di Kabupaten Cirebon (rupiah/satuan),
21.12.	Jumlah Pedagang Pasar Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Menurut Aktifitas Tempat Usaha Yang Buka Setiap Hari
21.12.	Jumlah Gudang Berdasarkan Tanda Daftar Gudang (TDG) di Kabupaten Cirebon
21.13.	Nilai Ekspor Berdasarkan Jenis Barang di Kabupaten Cirebon di Kabupaten Cirebon
21.12.	Jumlah Usaha Perdagangan Berdasarkan Surat Izin Perusahaan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Kabupaten Cirebon
21.13.	Jumlah Pasar/Toko Modern Berdasarkan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) di Kabupaten Cirebon
21.12.	Jumlah Pasar Rakyat di Kabupaten Cirebon
21.13.	Jumlah Perkembangan Industri Berdasarkan Unit Usaha di Kabupaten Cirebon
21.12.	Jumlah Perkembangan Industri Berdasarkan Tenaga Kerja di Kabupaten Cirebon
21.13.	Jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di Kabupaten Cirebon
21.12.	Jumlah perusahaan industri menengah dan perusahaan Kawasan industri di Kabupaten Cirebon yang masuk dalam SIINas
21.13.	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan di Kabupaten Cirebon
21.12.	Jumlah alat-alat ukur,takar,timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan di Kabupaten Cirebon
21.13.	Jumlah BDKT yang diawasi di Kabupaten Cirebon
21.12.	Jumlah data industri besar di Kabupaten Cirebon

Keterangan:

- Bappelitbangda menentukan data prioritas dan non prioritas
- Cara pengumpulan data: (1) Sensus; (2) Survei; (3) Kompilasi Produk Administrasi; dan (4) Cara Lain Sesuai Perkembangan Teknolo

**DAFTAR DATA/INFORMASI GEOSPASIAL YANG DIHASILKAN OLEH PRODUSEN DATA
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN CIREBON**

No	Data/Informasi Geospasial
1	PASAR BABAKAN
2	PASAR BATIK
3	PASAR CILEDUG
4	PASAR CIPEUJEUH
5	PASAR JAMBLANG
6	PASAR KUE WERU
7	PASAR PALIMANAN
8	PASAR PASALARAN
9	PASAR SUMBER

SEKTOR
EKONOMI

**DAFTAR DATA STATISTIK SEKTORAL YANG DIHASILKAN OLEH PRODUSEN DATA
DINAS KOPERASI DAN UKM**

No	Elemen Data
1	Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
2	Jumlah Anggota Koperasi Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
3	Jumlah Koperasi Aktif Menurut Jenis Koperasi di Kabupaten Cirebon
4	Jumlah Koperasi Aktif Menurut Jenis Kelamin dan Jenis Koperasi di Kabupaten Cirebon
5	Jumlah Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Berdasarkan Jenis Koperasi di Kabupaten Cirebon
6	Jumlah Rapat Akhir Tahun Koperasi Berdasarkan Jenis Koperasi di Kabupaten Cirebon
7	Jumlah Anggota Koperasi Berdasarkan Jenis Koperasi dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon
8	Jumlah Modal Koperasi Berdasarkan Jenis Koperasi dan Jenis Modal di Kabupaten Cirebon
9	Jumlah Karyawan Koperasi Berdasarkan Jenis Koperasi dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon
10	Jumlah Sertifikat yang Dimiliki Koperasi di Kabupaten Cirebon
11	Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berdasarkan Kategori Usaha di Kabupaten Cirebon
12	Jumlah Manajer Koperasi Berdasarkan Jenis Koperasi dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon
13	Jumlah Volume Usaha Koperasi Berdasarkan Jenis Koperasi di Kabupaten Cirebon
14	Proporsi Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Total Kredit di Kabupaten Cirebon

Keterangan:

- Bappelitbangda menentukan data prioritas dan non prioritas
- Cara pengumpulan data: (1) Sensus; (2) Survei; (3) Kompilasi Produk Administrasi; dan (4) Cara Lain Sesuai Perkembangan Teknologi

**DAFTAR DATA/INFORMASI GEOSPASIAL YANG DIHASILKAN OLEH PRODUSEN DATA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

No	Data/Informasi Geospasial
1	sebaran koperasi di kabupaten cirebon
2	sebaran UMKM di kabupaten cirebon

**SEKTOR
SOSIAL BUDAYA**

**DAFTAR DATA STATISTIK SEKTORAL YANG DIHASILKAN OLEH PRODUSEN DATA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

No	Elemen Data
1	Jumlah Tenaga Arsiparis Berdasarkan Tingkatan di Kabupaten Cirebon
2	Jumlah Tenaga Arsiparis Berdasarkan Golongan di Kabupaten Cirebon
3	Jumlah Tenaga Arsiparis Berdasarkan Pendidikan di Kabupaten Cirebon
4	Jumlah Tenaga Arsiparis Berdasarkan Usia di Kabupaten Cirebon
5	Jumlah Tenaga Arsiparis Berdasarkan Jenjang Jabatan di Kabupaten Cirebon
6	Jumlah Jabatan Fungsional Arsiparis di Kabupaten Cirebon
7	Jumlah Tenaga Teknis Pengelola Kearsipan di Kabupaten Cirebon
8	Jumlah Arsip Vital di Kabupaten Cirebon
9	Jumlah Arsip Statis di Kabupaten Cirebon
10	Jumlah Izin Penggunaan Arsip Bersifat Tertutup di Kabupaten Cirebon
11	Jumlah Penggunaan Arsip di Kabupaten Cirebon
12	Jumlah Perpustakaan Berdasarkan Jenis Perpustakaan di Kabupaten Cirebon
13	Jumlah Perpustakaan Umum Berdasarkan Tahun di Kabupaten Cirebon
14	Jumlah Perpustakaan Umum Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Cirebon
15	Jumlah Perpustakaan Umum Berdasarkan Desa atau Kelurahan di Kabupaten Cirebon
16	Jumlah Perpustakaan Umum Keliling di Kabupaten Cirebon
17	Jumlah Perpustakaan Sekolah di Kabupaten Cirebon
18	Jumlah Perpustakaan Online atau Digital di Kabupaten Cirebon
19	Jumlah Perpustakaan Desa Berdasarkan Keaktifannya Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Cirebon
20	Jumlah Perpustakaan sesuai Standar Nasional di Kabupaten Cirebon
21	Jumlah Judul/Koleksi Buku di Perpustakaan Umum Kabupaten Cirebon
22	Jumlah Pustakawan dan Tenaga Perpustakaan di Kabupaten Cirebon
23	Jumlah Pustakawan Berdasarkan Jenjang Jabatan di Kabupaten Cirebon
24	Jumlah Anggota Perpustakaan Berdasarkan Kategori Usia di Perpustakaan Umum di Kabupaten Cirebon
25	Jumlah Capaian Kotak Literasi Cerdas (Kolecer) Berdasarkan Jenis Capaian di Kabupaten Cirebon
26	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan Umum per Hari di Kabupaten Cirebon
27	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Umum Berdasarkan Jenis Perpustakaan di Kabupaten Cirebon
28	Jumlah Pengguna Sistem Informasi Kearsipan Berbasis Digital (SIKD) Berdasarkan Perangkat Daerah di Kabupaten Cirebon
29	Jumlah Anggota Konvensional Perpustakaan Umum Berdasarkan Status Pekerjaan di Kabupaten Cirebon
30	Jumlah Buku di Kotak Literasi Cerdas (KOLECER) di Kabupaten Cirebon
31	Alamat Perpustakaan Umum di Kabupaten Cirebon

Keterangan:

- Bappelitbangda menentukan data prioritas dan non prioritas
- Cara pengumpulan data: (1) Sensus; (2) Survei; (3) Kompilasi Produk Administrasi; dan (4) Cara Lain Sesuai Perkembangan Teknologi

**DAFTAR DATA/INFORMASI GEOSPASIAL YANG DIHASILKAN OLEH PRODUSEN DATA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

No	Data/Informasi Geospasial
1	Sebaran Perpustakaan Umum di Kabupaten Cirebon
2	Sebaran Perpustakaan Sekolah di Kabupaten Cirebon
3	Data Kotak Literasi Cerdas (KOLECER) di Kabupaten Cirebon

**SEKTOR
EKONOMI**

**DAFTAR DATA STATISTIK SEKTORAL YANG DIHASILKAN OLEH PRODUSEN DATA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

No	Elemen Data
1	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Penanaman Modal Asing Berdasarkan Sektor Usaha di Kabupaten Cirebon
2	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Penanaman Modal Dalam Negeri Berdasarkan Sektor Usaha di Kabupaten Cirebon
3	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Kategori Tenaga Kerja di Kabupaten Cirebon
4	Jumlah Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
5	Jumlah Proyek Penanaman Modal Asing Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
6	Jumlah Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Berdasarkan Sektor Usaha di Kabupaten Cirebon
7	Jumlah Investasi Penanaman Modal Asing Berdasarkan Sektor Usaha di Kabupaten Cirebon
8	Jumlah Investasi Penanaman Modal Asing Berdasarkan Asal Negara di Kabupaten Cirebon
9	Jumlah Unit Usaha Berdasarkan Sektor Usaha di Kabupaten Cirebon
10	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)
11	Jumlah Pelayanan Perizinan Berbasis Online
12	Jumlah Tenaga Kerja Lokal yang Terserap
13	Jumlah Perizinan yang Diterbitkan sesuai SOP Berdasarkan Tahun di Kabupaten Cirebon
14	Jumlah Retribusi Pelayanan Perizinan

Keterangan:

- Bappelitbangda menentukan data prioritas dan non prioritas
- Cara pengumpulan data: (1) Sensus; (2) Survei; (3) Kompilasi Produk Administrasi; dan (4) Cara Lain Sesuai Perkembangan Teknologi

**DAFTAR DATA/INFORMASI GEOSPASIAL YANG DIHASILKAN OLEH PRODUSEN DATA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

No	Data/Informasi Geospasial
1	
2	
3	
4	
5	

**SEKTOR
PEMERINTAHAN**

**DAFTAR DATA STATISTIK SEKTORAL YANG DIHASILKAN OLEH PRODUSEN DATA
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa**

No	Elemen Data
1	Jumlah Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
2	Jumlah Desa Berdasarkan Potensi di Kabupaten Cirebon
3	Jumlah Aparatur Desa Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Cirebon
4	Jumlah Rukun Tetangga (RT) menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
5	Jumlah Rukun Warga (RW) menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
6	Jumlah Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) menurut Laporan Tahunan TP.PKK Kabupaten di Kabupaten Cirebon
7	Jumlah Rukun Tetangga (RT) menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
8	Jumlah Rukun Warga (RW) menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
9	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Masyarakat Desa (LPMD) menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
10	Jumlah Posyandu Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
11	Jumlah Anggota Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Umum Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon
12	Jumlah Anggota Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon
13	Jumlah Anggota Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Khusus Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon
14	Jumlah Desa Berdasarkan Sumber Dana Pembiayaan Kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kabupaten Cirebon
15	Jumlah Desa Berdasarkan Status Strata Desa di Kabupaten Cirebon
16	Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
17	Jumlah Desa yang Memiliki Akses Internet Berdasarkan Status Keberadaan di Kabupaten Cirebon
18	Daftar Desa Berdasarkan Status Pemerintah di Kabupaten Cirebon
19	Daftar Desa Berdasarkan Provider Telepon Seluler di Kabupaten Cirebon
20	Jumlah Desa Berdasarkan Keberadaan Internet di Kantor Desa di Kabupaten Cirebon
21	Jumlah Desa Berdasarkan Jarak ke Pos Kesehatan Desa (POSKESDES) atau Pondok Bersalin Desa (POLINDES) Terdekat di Kabupaten Cirebon
22	Jumlah Desa Berdasarkan Jarak ke Sekolah Luar Biasa (SLB) Terdekat di Kabupaten Cirebon
23	Jumlah Desa Berdasarkan Jarak ke Sekolah Menengah Umum/Kejuruan (SMU/K) atau Madrasah Aliyah (MA) Terdekat di Kabupaten Cirebon
24	Jumlah Penduduk Desa Berdasarkan Kategori Usia di Kabupaten Cirebon
25	Jumlah Penduduk Desa Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon
26	Jumlah Desa yang Memiliki Sarana Puskesmas Tanpa Rawat Inap Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
27	Jumlah Desa yang Memiliki Sarana Rumah Sakit Bersalin Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
28	Jumlah Desa yang Memiliki Sarana Puskesmas Pembantu Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
29	Jumlah Desa yang Memiliki Sarana Puskesmas Dengan Rawat Inap Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
30	Jumlah Desa yang Memiliki Sarana Poliklinik/Balai Pengobatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
31	Jumlah Desa yang Memiliki Sarana Apotek Pengobatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
32	Jumlah Desa Berdasarkan Sumber Penghasilan Utama Penduduk Desa di Kabupaten Cirebon
33	Jumlah Keluarga di Desa Berdasarkan Penggunaan Sumber Listrik di Kabupaten Cirebon
34	Jumlah Desa Berdasarkan Kondisi Pencemaran Air di Kabupaten Cirebon

Keterangan:

- Bappelitbangda menentukan data prioritas dan non prioritas
- Cara pengumpulan data: (1) Sensus; (2) Survei; (3) Kompilasi Produk Administrasi; dan (4) Cara Lain Sesuai Perkembangan Teknologi

**DAFTAR DATA/INFORMASI GEOSPASIAL YANG DIHASILKAN OLEH PRODUSEN DATA
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa**

No	Data/Informasi Geospasial
2	Data Rukun Tetangga (RT) menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
3	Data Rukun Warga (RW) menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
4	Data Lembaga Kemasyarakatan Masyarakat Desa (LPMD) menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
5	Data Posyandu Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon

**SEKTOR
PEMERINTAHAN**

**DAFTAR DATA STATISTIK SEKTORAL YANG DIHASILKAN OLEH PRODUSEN DATA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN CIREBON**

No	Elemen Data
1	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon
2	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Cirebon
3	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Golongan Ruang di Kabupaten Cirebon
4	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Usia di Kabupaten Cirebon
5	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Agama di Kabupaten Cirebon
6	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Eselon di Kabupaten Cirebon
7	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Perangkat Daerah di Kabupaten Cirebon
8	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Kecamatan di Kabupaten Cirebon
9	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Fungsional berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon
10	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Fungsional bersertifikat kompetensi berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon
11	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Purnabakti berdasarkan Perangkat Daerah di Kabupaten Cirebon
12	Jumlah Calon Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Perangkat Daerah di Kabupaten Cirebon
13	Jumlah Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon
14	Jumlah Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jabatan di Kabupaten Cirebon
15	Jumlah Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Cirebon
16	Jumlah Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Golongan di Kabupaten Cirebon
17	Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Keterangan:

- Bappellitbangda menentukan data prioritas dan non prioritas
- Cara pengumpulan data: (1) Sensus; (2) Survei; (3) Kompilasi Produk Administrasi; dan (4) Cara Lain Sesuai Perkembangan Teknologi

**DAFTAR DATA/INFORMASI GEOSPASIAL YANG DIHASILKAN OLEH PRODUSEN DATA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN CIREBON**

No	Data/Informasi Geospasial
1	
2	
3	
4	
5	

**SEKTOR
PEMERINTAHAN**

**DAFTAR DATA STATISTIK SEKTORAL YANG DIHASILKAN OLEH PRODUSEN DATA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

No	Elemen Data
1	Luas Daerah di Kabupaten Cirebon
2	Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
3	Jumlah Pulau di Kabupaten Cirebon
4	Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
5	Tinggi Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
6	Jarak Kecamatan di Kabupaten Cirebon ke Ibukota
7	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon
8	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cirebon
9	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon
10	Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja SKPD Kabupaten Cirebon
11	Daftar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA Kabupaten Cirebon
12	Daftar Hasil Kajian Infrastruktur dan Kewilayahan di Kabupaten Cirebon
13	Daftar Hasil Kajian Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Ekonomi dan Pembangunan di Kabupaten Cirebon
14	Daftar Hasil Kajian Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Peraturan di Kabupaten Cirebon
15	Daftar Hasil Kajian Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi di Kabupaten Cirebon
16	Daftar Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Kabupaten Cirebon
17	Daftar Dokumen Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Cirebon
18	Daftar Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) / Daftar Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon
19	Daftar Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon
20	Daftar Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon

Keterangan:

- Bappelitbangda menentukan data prioritas dan non prioritas

- Cara pengumpulan data: (1) Sensus; (2) Survei; (3) Kompilasi Produk Administrasi; dan (4) Cara Lain Sesuai Perkembangan Teknologi

**DAFTAR DATA/INFORMASI GEOSPASIAL YANG DIHASILKAN OLEH PRODUSEN DATA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

No	Data/Informasi Geospasial
1	
2	
3	
4	
5	

**SEKTOR
PEMERINTAHAN**

**DAFTAR DATA STATISTIK SEKTORAL YANG DIHASILKAN OLEH PRODUSEN DATA
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

No	Elemen Data
1	Jumlah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Cirebon
2	Jumlah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Cirebon
3	Jumlah Pajak Hotel Berdasarkan Kelas di Kabupaten Cirebon
4	Jumlah Pajak Restoran Berdasarkan Jenis di Kabupaten Cirebon
5	Jumlah Pajak Hiburan di Kabupaten Cirebon
6	Jumlah Pajak Parkir di Kabupaten Cirebon
7	Jumlah Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Cirebon
8	Jumlah Pajak Air Tanah di Kabupaten Cirebon
9	Jumlah Pajak Reklame Berdasarkan Jenis di Kabupaten Cirebon
10	Jumlah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Cirebon
11	Jumlah Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Cirebon
12	Jumlah Target Pajak Daerah Berdasarkan Jenis
13	Jumlah Pendapatan Pajak Daerah Berdasarkan Jenisnya di Kabupaten Cirebon

Keterangan:

- Bappelitbangda menentukan data prioritas dan non prioritas
- Cara pengumpulan data: (1) Sensus; (2) Survei; (3) Kompilasi Produk Administrasi; dan (4) Cara Lain Sesuai Perkembangan Teknologi

**DAFTAR DATA/INFORMASI GEOSPASIAL YANG DIHASILKAN OLEH PRODUSEN DATA
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

No	Data/Informasi Geospasial
1	Sebaran Hotel di Kabupaten Cirebon
2	Sebaran Restoran di Kabupaten Cirebon
3	Sebaran Tempat Hiburan di Kabupaten Cirebon
4	Sebaran Tempat Parkir di Kabupaten Cirebon

**SEKTOR
PEMERINTAHAN**

**DAFTAR DATA STATISTIK SEKTORAL YANG DIHASILKAN OLEH PRODUSEN DATA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

No	Elemen Data
1	Jumlah Pendapatan Dana Perimbangan Berdasarkan Jenisnya
2	Jumlah Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah Berdasarkan Jenisnya di Kabupaten Cirebon
3	Jumlah Pendapatan Lainnya yang Sah Berdasarkan Jenisnya di Kabupaten Cirebon
4	Jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Berdasarkan Jenisnya di Kabupaten Cirebon
5	Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah Berdasarkan Jenisnya

Keterangan:

- Bappelitbangda menentukan data prioritas dan non prioritas
- Cara pengumpulan data: (1) Sensus; (2) Survei; (3) Kompilasi Produk Administrasi; dan (4) Cara Lain Sesuai Perkembangan Teknologi

**DAFTAR DATA/INFORMASI GEOSPASIAL YANG DIHASILKAN OLEH PRODUSEN DATA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

No	Data/Informasi Geospasial
1	
2	
3	
4	
5	

**SEKTOR
PEMERINTAHAN**

**DAFTAR DATA STATISTIK SEKTORAL YANG DIHASILKAN OLEH PRODUSEN DATA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

No	Elemen Data
1	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) Berdasarkan Tahun di Kabupaten Cirebon
2	Jumlah Kegiatan Pembinaan LSM, Ormas, dan OKP Berdasarkan Tahun di Kabupaten Cirebon
3	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Berdasarkan Tahun di Kabupaten Cirebon
4	Jumlah Orang Asing Berdasarkan Tahun di Kabupaten Cirebon
5	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Berdasarkan Tahun di Kabupaten Cirebon
6	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan Politik Berdasarkan Tahun di Kabupaten Cirebon
7	Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Tahun di Kabupaten Cirebon
8	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Legalitas di Kabupaten Cirebon
9	Jumlah LSM Berdasarkan Legalitas di Kabupaten Cirebon
10	Jumlah Potensi Konflik Berdasarkan Tahun di Kabupaten Cirebon
11	Jumlah Laporan Kejadian Konflik Sosial di Kabupaten Cirebon
12	Hasil Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Cirebon
13	Hasil Pendalaman/Penyelidikan Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Cirebon
14	Jumlah Laporan Kejadian Penangkapan/Penanganan Terorisme di Kabupaten Cirebon
15	Jumlah Pembinaan kepada Eks Napiter/Keluarga Napiter dan Kelompok Radikal di Kabupaten Cirebon
16	Hasil Penyelidikan kepada Teroris dan Kelompok Radikal di Kabupaten Cirebon
17	Jumlah Laporan Kegiatan Pengawasan Orang Asing di Kabupaten Cirebon
18	Jumlah Penanganan Pengawasan Orang Asing di Kabupaten Cirebon
19	Jumlah Proses Penyelidikan Pengawasan Orang Asing di Kabupaten Cirebon

Keterangan:

- Bappelitbangda menentukan data prioritas dan non prioritas

- Cara pengumpulan data: (1) Sensus; (2) Survei; (3) Kompilasi Produk Administrasi; dan (4) Cara Lain Sesuai Perkembangan Teknologi

**DAFTAR DATA/INFORMASI GEOSPASIAL YANG DIHASILKAN OLEH PRODUSEN DATA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

No	Data/Informasi Geospasial
1.	Sebaran LSM, Ormas dan OKP di Kabupaten Cirebon

SEKTOR
SOSIAL BUDAYA

DAFTAR DATA STATISTIK SEKTORAL YANG DIHASILKAN OLEH PRODUSEN DATA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Elemen Data
31.1.	Jumlah Kejadian Kebakaran Lahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
31.2.	Jumlah Kejadian Bencana Banjir Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
31.3.	Jumlah Kejadian Tanah Longsor Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
31.4.	Jumlah Kejadian Pergerakan Tanah Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
31.5.	Jumlah Kejadian Bencana Puting Beliung Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
31.6.	Jumlah Kejadian Bencana Kekeringan Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
31.7.	Jumlah Kejadian Bencana Banjir ROB Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
31.8.	Jumlah Kejadian Bencana Hujan dan Angin (Cuaca Ekstrem) Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
31.9.	Jumlah Kejadian Bencana Berdasarkan Jenis Bencana di Kabupaten Cirebon
31.10.	Jumlah Kejadian Kebakaran Lahan Menurut Desa di Kabupaten Cirebon
31.11.	Jumlah Kejadian Bencana Banjir Menurut Desa di Kabupaten Cirebon
31.12.	Jumlah Kejadian Tanah Longsor Menurut Desa di Kabupaten Cirebon
31.13.	Jumlah Kejadian Pergerakan Tanah Menurut Desa di Kabupaten Cirebon
31.14.	Jumlah Kejadian Bencana Puting Beliung Menurut Desa di Kabupaten Cirebon
31.15.	Jumlah Kejadian Bencana Kekeringan Menurut Desa di Kabupaten Cirebon
31.16.	Jumlah Kejadian Banjir ROB Menurut Desa di Kabupaten Cirebon
31.17.	Jumlah Kejadian Bencana Hujan dan Angin (Cuaca Ekstrem) Menurut Desa di Kabupaten Cirebon
31.18.	Jumlah Korban Jiwa Akibat Bencana Berdasarkan Jenis Bencana di Kabupaten Cirebon
31.19.	Jumlah Korban yang Menderita Akibat Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
31.20.	Jumlah Korban yang Hilang Akibat Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
31.21.	Jumlah Korban Meninggal Dunia Akibat Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
31.22.	Jumlah Korban yang Mengalami Luka-luka Akibat Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
31.23.	Jumlah Korban yang Mengungsi Akibat Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
31.24.	Jumlah Korban yang Menderita Akibat Bencana Alam Menurut Desa di Kabupaten Cirebon
31.25.	Jumlah Korban yang Hilang Akibat Bencana Alam Menurut Desa di Kabupaten Cirebon
31.26.	Jumlah Korban Meninggal Dunia Akibat Bencana Alam Menurut Desa di Kabupaten Cirebon
31.27.	Jumlah Korban yang Mengalami Luka-Luka Akibat Bencana Alam Menurut Desa di Kabupaten Cirebon
31.28.	Jumlah Korban yang Mengungsi Akibat Bencana Alam Menurut Desa di Kabupaten Cirebon
31.29.	Jumlah Kerusakan Rumah/Tempat Tinggal Akibat Bencana Alam Berdasarkan Kondisi di Kabupaten Cirebon
31.30.	Jumlah Rumah/Tempat Tinggal yang Rusak Ringan Akibat Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
31.31.	Jumlah Rumah/Tempat Tinggal yang Rusak Sedang Akibat Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
31.32.	Jumlah Rumah/Tempat Tinggal yang Rusak Berat Akibat Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
31.33.	Jumlah Rumah/Tempat Tinggal yang Terendam Akibat Bencana Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
31.34.	Jumlah Rumah/Tempat Tinggal yang Terancam Akibat Bencana Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
31.35.	Jumlah Rumah/Tempat Tinggal yang Tertimbun Akibat Bencana Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
31.36.	Jumlah Kerusakan Rumah/Tempat Tinggal yang Rusak Ringan Akibat Bencana Menurut Desa di Kabupaten Cirebon
31.37.	Jumlah Kerusakan Rumah/Tempat Tinggal yang Rusak Sedang Akibat Bencana Menurut Desa di Kabupaten Cirebon
31.38.	Jumlah Kerusakan Rumah/Tempat Tinggal Rusak Berat Akibat Bencana Menurut Desa di Kabupaten Cirebon
31.39.	Jumlah Rumah/Tempat Tinggal yang Terendam Akibat Bencana Menurut Desa di Kabupaten Cirebon
31.40.	Jumlah Rumah/Tempat Tinggal yang Terancam Akibat Bencana Menurut Desa di Kabupaten Cirebon
31.41.	Jumlah Rumah/Tempat Tinggal yang Tertimbun Akibat Bencana Menurut Desa di Kabupaten Cirebon
31.42.	Jumlah Sarana dan Prasarana Umum Terdampak Bencana di Kabupaten Cirebon
31.43.	Jumlah Fasilitas Pendidikan Terdampak Bencana Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
31.44.	Jumlah Fasilitas Ibadah Terdampak Bencana Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
31.45.	Jumlah Fasilitas Kesehatan Terdampak Bencana Berdasarkan Desa di Kabupaten Cirebon
31.46.	Jumlah Jalan Terdampak Bencana Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
31.47.	Jumlah Jembatan Terdampak Bencana Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
31.48.	Jumlah TPT (Tembok Penahan Tanah) Terdampak Bencana Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
31.49.	Jumlah Fasilitas Pendidikan Terdampak Bencana Menurut Desa di Kabupaten Cirebon
31.50.	Jumlah Fasilitas Ibadah Terdampak Bencana Menurut Desa di Kabupaten Cirebon
31.51.	Jumlah Fasilitas Kesehatan Terdampak Bencana Menurut Desa di Kabupaten Cirebon
31.52.	Jumlah Jalan Terdampak Bencana Menurut Desa di Kabupaten Cirebon
31.53.	Jumlah Jembatan Terdampak Bencana Menurut Desa di Kabupaten Cirebon
31.54.	Jumlah TPT (Tembok Penahan Tanah) Terdampak Bencana Menurut Desa di Kabupaten Cirebon
31.55.	Jumlah Ternak, Sawah, Perkebunan dan Hutan Terdampak Bencana di Kabupaten Cirebon
31.56.	Jumlah Sapi Terdampak Bencana Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
31.57.	Jumlah Kambing Terdampak Bencana Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
31.58.	Jumlah Ayam Terdampak Bencana Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
31.59.	Jumlah Sawah Terdampak Bencana Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
31.60.	Jumlah Kebun/Lahan Terdampak Bencana Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
31.61.	Jumlah Hutan Terdampak Bencana Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon
31.62.	Jumlah Sapi Terdampak Bencana Menurut Desa di Kabupaten Cirebon
31.63.	Jumlah Kambing Terdampak Bencana Menurut Desa di Kabupaten Cirebon

No	Elemen Data
31.64.	Jumlah Ayam Terdampak Bencana Menurut Desa di Kabupaten Cirebon
31.65.	Jumlah Sawah Terdampak Bencana Menurut Desa di Kabupaten Cirebon
31.66.	Jumlah Kebun/Lahan Terdampak Bencana Menurut Desa di Kabupaten Cirebon
31.67.	Jumlah Hutan Terdampak Bencana Menurut Desa di Kabupaten Cirebon
31.68.	Indeks Resiko Bencana di Kabupaten Cirebon

Keterangan:

- Bappelitbangda menentukan data prioritas dan non prioritas
- Cara pengumpulan data: (1) Sensus; (2) Survei; (3) Kompilasi Produk Administrasi; dan (4) Cara Lain Sesuai Perkembangan Teknologi

**DAFTAR DATA/INFORMASI GEOSPASIAL YANG DIHASILKAN OLEH PRODUSEN DATA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

No	Data/Informasi Geospasial
1	Wilayah Rawan Bencana Banjir
2	Wilayah Rawan Bencana Longsor
3	Wilayah Rawan Bencana Kekeringan
4	Wilayah Rawan Bencana Kebakaran Lahan
5	Wilayah Rawan Bencana Rob